



MENGAPRESIASI INOVASI

**SEMBILAN TEROBOSAN
KABUPATEN/KOTA
PERAIH OTONOMI AWARDS 2013
di KALIMANTAN BARAT**



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

KINERJA
Improving Public Services



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

MENGAPRESIASI INOVASI

**SEMBILAN TEROBOSAN
KABUPATEN/KOTA
PERAIH OTONOMI AWARDS 2013
di KALIMANTAN BARAT**

Oleh :

Pontianak Post Institute of Pro Otonomi (PPIP)

MENGAPRESIASI INOVASI
Sembilan Terobosan Kabupaten/Kota
Peraih Otonomi Awards 2013 di Kalimantan Barat

PENULIS
Budi Darmawan, Angga Purdika, Mareta,
Debi Heristian, dan Dian Roosandra Vijaya

PENYELARAS BAHASA
Andri Teguh

COVER DESIGN
Wahyu Kokkang

PENATA LETAK
Alvian Kurniadi

PENERBIT
The Pontianak Post Institute of Pro Otonomi (PPIP)

ALAMAT PENERBIT
Graha Pena Lt 4, Jl Gajahmada 2-4 Pontianak
Telp. 0561-735070 / 735071 ext 210

Terbitan Pertama, November 2013
xv+86 halaman; 15 x 22 cm

ISBN:
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
All rights reserved

Kata Pengantar

Sejak akhir 2012, KINERJA – USAID sangat mendukung pelaksanaan *Otonomi Awards* yang dilakukan *The Pontianak Post Institute Pro-Otonomi* (PPIP) bersama *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi*, JPIP. Sebagai lembaga yang dilahirkan untuk menjaga dan mendorong implementasi otonomi daerah secara baik, PPIP berkepentingan untuk menciptakan proses rekonstruksi desentralisasi dan otonomi daerah secara obyektif. Salah satu cara terbaik adalah dengan membuka ruang diskursus yang memadai dan menginformasikan secara luas sejumlah praktik baik (*best practices*) otonomi daerah.

KINERJA sangat mengapresiasi berbagai upaya PPIP sebagai organisasi nirlaba yang bersifat independen untuk secara konsisten memantau pelaksanaan otonomi daerah. Hingga saat ini, PPIP telah berhasil menjalankan aktivitas monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan *Otonomi Awards* yang meliputi 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat. Tahun 2013 menjadi tahun pertama penganugerahan *Otonomi Awards* oleh PPIP.

Untuk memberikan dampak kompetitif, PPIP mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala pada setiap pelaksanaan *Otonomi Awards*. Penilaian ini didasarkan kepada tiga parameter utama, yaitu perkembangan ekonomi, pelayanan publik dan kinerja politik lokal.

Untuk mereka yang belum begitu mengenal KINERJA, maka perkenankanlah saya memberikan deskripsi singkat terkait KINERJA.

KINERJA adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Program KINERJA dilaksanakan di lima provinsi di Indonesia: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Papua. Program KINERJA-USAID difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tiga sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan iklim usaha.

Salah satu pendekatan utama yang digunakan KINERJA adalah mendorong adanya replikasi praktik-praktik baik. Karena pendekatan ini sangatlah sejalan dengan PPIP, KINERJA mendukung pelaksanaan *Otonomi Awards* di Kalimantan Barat dan juga dua provinsi wilayah program KINERJA lainnya, yaitu: Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Akhir kata, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini dan semoga dapat menjadi wadah pembelajaran dan tukar-pikiran bersama terkait praktik-praktik baik dan inovatif yang telah dilakukan berbagai pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang telah meraih penghargaan *Otonomi Awards 2013*.

Selamat dan sukses selalu untuk PPIP! Terima kasih.

Elke Rapp



Chief of Party KINERJA – USAID





**Peta Peraih
Otonomi Awards
Kalimantan Barat 2013**

Kategori Utama



Kategori Utama
Daerah dengan Terobosan Menonjol
Bidang Pembangunan Ekonomi
(Kabupaten Sambas)

Kategori Khusus



Kategori Khusus
Daerah dengan Terobosan Inovatif
Bidang Pertumbuhan Ekonomi

(Kabupaten Sanggau)



Kategori Khusus
Daerah dengan Terobosan Inovatif
Bidang Pemerataan Ekonomi

(Kabupaten Kubu Raya)



Kategori Khusus
Daerah dengan Terobosan Inovatif
Bidang Pemberdayaan Ekonomi

(Kabupaten Sambas)



Kategori Utama
Daerah dengan Terobosan Menonjol
Bidang Pelayanan Publik
(Kabupaten Kayong Utara)



Kategori Khusus
Daerah dengan Terobosan Inovatif
Bidang Pelayanan Kesehatan

(Kabupaten Landak)



Kategori Khusus
Daerah dengan Terobosan Inovatif
Bidang Pelayanan Pendidikan

(Kabupaten Kayong Utara)



Kategori Khusus
Daerah dengan Terobosan
Bidang Pelayanan Adminsitrasii

(Kabupaten Bengkayang)



Kategori Utama
Daerah dengan Profil Menonjol
Kinerja Politik Lokal

(Kota Pontianak)



Kategori Khusus
Daerah dengan Profil Menonjol
Bidang Akuntabilitas Publik

(Kota Pontianak)



Kategori Khusus
Daerah dengan Profil Menonjol
Bidang Partisipasi Publik

(Kabupaten Sintang)

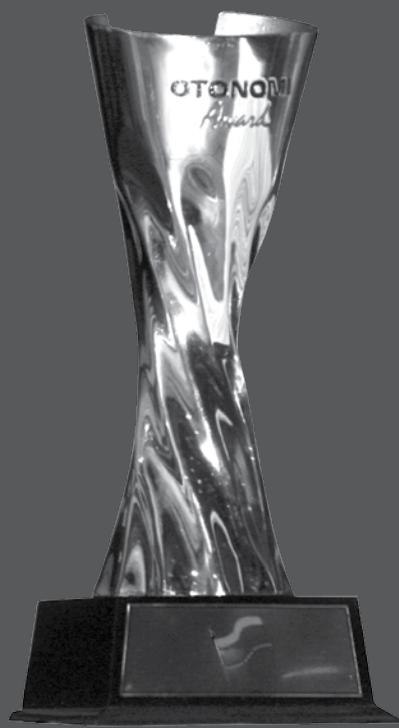


Kategori Unik
Daerah dengan Terobosan Menonjol
dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Kabupaten Ketapang)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Chief of Party KINERJA – USAID	iii
Peta Peraih Otonomi Awards Kalimantan Barat 2013.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Kabupaten Kayong Utara	
Berani Gratiskan Pendidikan 12 Tahun	3
Kabupaten Landak	
Masyarakat Sehat Lewat Jamban dan Pamdes	13
Kabupaten Bengkayang	
Pelayanan Perizinan Prima di Bumi Sebalo.....	21
Kabupaten Sanggau	
Membangun Perekonomian Daerah lewat Desa Fokus.....	29
Desa Fokus, Menghubungkan Desa Terisolasi	33
Kabupaten Kubu Raya	
Armada Semut, Membuka Akses Kehidupan Nelayan Kecil	39
Kabupaten Sambas	
Bangun Fasilitas Penunjang Demi Kain Tenun.....	49
Disukai SBY, Dikenal di Inggris	52
Kota Pontianak	
Pemkot Pontianak Paling Transparan se-Kalbar	57
Bersih, Transparan, dan Mudah Diakses Publik.....	62
Kabupaten Sintang	
Manajemen Desa Mandiri Harumkan Kabupaten Sintang	69
Kabupaten Ketapang	
Hutan Kota Teluk Akar Begantung Paling Unik di Dunia	77
Kru PPIP	83



— KABUPATEN —
KAYONG UTARA

**KABUPATEN
KAYONG UTARA**

*Peraih Otonomi Award
Indikator Pelayanan Pendidikan*



Berani Gratiskan Pendidikan 12 Tahun



Otonomi Award bidang pendidikan diraih Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten termuda itu berani menggratiskan pendidikan 12 Tahun. Tampak Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid (nomor keempat dari kiri) dengan bangga menerima trofi Otonomi Awards 2013.

Kabupaten Kayong Utara paling sukses menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun. Buktinya, sejak kabupaten itu berdiri hingga sekarang, program pendidikan gratis tetap berjalan. Meskipun, APBD pada awal hanya Rp 300 miliar per tahun. Target Bupati Hildi Hamid dengan menggratiskan pendidikan adalah peningkatan SDM.



Sabtu, 14 Desember 2013 Ruang Takalar, Grand Mahkota Hotel Pontianak, sontak riuh. Pemicunya, pembawa acara mengumumkan Kabupaten Kayong Utara sebagai pemenang Otonomi Awards bidang pendidikan. Lebih heboh lagi, Kayong Utara berhasil mengungguli daerah lain dalam merebut trofi emas (Kategori Utama). Alhasil, bupati Kayong Utara Hildi Hamid seketika itu berpelukan dengan beberapa SKPD yang hadir. Hildi pun mendapat ucapan selamat dari beberapa bupati yang hadir. Sambil menuju panggung kehormatan, senyum Hildi benar-benar semringah. Wajar kalau orang nomor satu di Kayong Utara itu merasa bangga. Berkat hasil kerja kerasnya, pendidikan di Kayong Utara menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, Hildi berani dan lantang membuat inovasi dengan menggratiskan pendidikan 12 tahun.

Awalnya, dia sempat mendapat cibiran kanan-kiri. Banyak orang yang menilai kebijakan Hildi itu terlalu berani. Mengapa? Ya karena APBD Kayong Utara masih kecil. Parahnya lagi, akibat kebijakannya itu, banyak guru yang tidak mendukung Hildi saat pemilihan bupati Kayong Utara. "Saya tahu.



Saya sadar. Dengan kebijakan menggratiskan pendidikan 12 tahun ini, pasti ada pihak yang tersakiti. Ya buktinya, saya tidak dipilih oleh sebagian guru waktu pemilihan bupati tempo hari," ungkap Hildi.

Tapi, itulah Hildi. Orangnya berani. Tekadnya kuat. Buktinya, pendidikan gratis 12 tahun di Kayong Utara sukses sampai sekarang. Bagi Hildi, pendidikan gratis merupakan salah satu program komitmen utama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Realisasi pendidikan gratis diwujudkan dengan penuh keinginan tinggi. Hildi ingin memberikan yang terbaik serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Kayong Utara.

Komitmen itu bukan sekadar kepentingan politik semata, namun sebuah keinginan memajukan Kayong Utara sebagai salah satu daerah baru di Kalbar. Menjadi kabupaten otonom baru dan termiskin di Kalimantan Barat pada 2007, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara membuat keputusan berani dengan membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Bahkan, siswa masih mendapat seragam gratis minimal dua setel setiap tahun ajaran baru.

Kabupaten Kayong Utara dimekarkan dari Kabupaten Ketapang pada 2007. Boleh dibilang kala itu, sektor pendidikannya sangat parah. Kendati program wajib belajar 12 tahun sudah bertahun-tahun digulirkan, rata-rata lama sekolah anak-anak di Kayong Utara hanya lima tahun. Di antara 80 ribu penduduk usia produktif, hanya 6 persen tingkat pendidikan yang lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi.

Hildi menceritakan, program tersebut diawali dari kajian akademis 2006. Atas potensi dan hambatan kabupaten jika diresmikan sebagai daerah otonom baru itulah awal munculnya ide program tersebut. "Hambatan atau tantangan yang paling berat adalah kualitas SDM masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah di sektor pendidikan. Data pada saat itu menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendidikan tamat SMA ke atas hanya 6 persen dari jumlah penduduk yang ada. Itu sudah termasuk pegawai kecamatan dan guru," jelas bupati yang kini dipercaya masyarakat kembali memimpin Kayong Utara untuk periode kedua tersebut.

Alasan lain munculnya program pendidikan gratis itu adalah amanat Undang-Undang Pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak masyarakat. Amanat undang-undang tersebut juga menjadi semangat bagi Hildi untuk terus meningkatkan program itu. "Begini dilantik menjadi kepala daerah pada 2008, kami kemudian melakukan *assessment* di bidang pendidikan. Persoalan besar yang kami temukan adalah anak-anak usia sekolah antara 6 tahun hingga 18 tahun yang berjumlah 28 ribu orang. Sebanyak 11 ribu di antaranya tidak bersekolah," ungkap Hildi.

====

Kondisi pendidikan di Kayong Utara yang memprihatinkan itu disebabkan berbagai masalah. Antara lain, minimnya jumlah sekolah, kemiskinan, dan rendahnya motivasi pendidikan.

Kemiskinan bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kayong Utara pada 2007 yang hanya Rp 260 ribu. Rendahnya motivasi pendidikan terlihat dari rendahnya angka partisipasi kasar (APK) yang hanya 67 persen

pada 2007. Itu terjadi karena sebagian besar anak usia sekolah terserap ke sektor usaha penangkapan ikan.

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata tidak bisa banyak menolong Kayong Utara keluar dari kubangan masalah pendidikan. "Dana BOS lebih banyak terserap untuk memberi honor guru sehingga penyediaan ruang kelas baru hampir tak bisa tersentuh," kata Hildi.

Berangkat dari rumitnya persoalan pendidikan itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara lalu memutuskan untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat SMA sejak 2009, walaupun pendapatan asli daerah (PAD) pada saat itu hanya Rp 5 miliar. "Pembiayaan pendidikan gratis itu lebih banyak berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah. Ini soal prioritas. Kami yakin, persoalan rendahnya kualitas SDM yang bermuara pada kemiskinan akan teratasi jika semua penduduk mendapat kemudahan akses pendidikan," tegas Hildi.

Dana yang dialokasikan untuk pendidikan saat program tersebut dimulai pada 2009 mencapai Rp 62 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Rp 259 miliar. Alokasi itu tidak termasuk gaji guru honorer dan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) karena beban pembiayaannya sudah ditarik ke beban pemerintah daerah. Dalam lima tahun pertama kepemimpinannya, Hildi berfokus membangun dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan. Berdasar data awal ketika program tersebut dimunculkan, Kayong Utara hanya memiliki 81 sekolah dasar (SD), 6 sekolah menengah pertama (SMP), dan 4 sekolah menengah atas (SMA). Saat ini Kayong Utara telah memiliki 15 TK, 107 SD, dan 7 sekolah agama setingkat SD, 40 SMP dan 4 sekolah agama setingkatnya, 11 SMA dan 3 sekolah agama setingkatnya, serta 4 SMK.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Tasfirani menyatakan, inisiatör program pendidikan gratis tersebut adalah Bupati Kayong Utara Hildi Hamid. "Untuk menukseskan program ini, Bupati melibatkan kepala Dinas Pendidikan, Kabid Dikdas dan Dikmen, serta kepala sekolah sebagai pihak utamanya," jelasnya.



Selain Dinas Pendidikan, semua *stakeholder* di Kayong Utara dilibatkan untuk menyukseskan program tersebut. Untuk memantau program itu, bupati juga menempatkan kepala seksi (Kasi) bidang pendidikan di setiap kantor camat.

Perubahan yang paling dirasakan setelah peluncuran program tersebut adalah meningkatnya angka partisipasi murni (APM) dan APK secara drastis. Pada 2007, APM hanya 65 dan APK 67 persen. Berdasar data 2013, APM menjadi 99,27 dan APK 122,37 persen. "Perubahan yang paling besar adalah tidak ada lagi anak Kabupaten Kayong Utara usia sekolah yang tidak bersekolah. Mereka kini semua bersekolah karena akses tempat pendidikan juga sudah dekat," ungkap Tasfirani.

Untuk memuluskan program tersebut, Pemkab Kayong Utara konsisten pada amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional, yakni mengalokasikan 20 persen anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sebanyak Rp 8 miliar dana digulirkan dalam setahun. Dana itu digunakan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) mulai SD hingga SMA. Dana lain yang menunjang program pendidikan gratis itu berasal dari APBN dan ABPD provinsi yang berupa BOS dan *block grant* serta bantuan sosial (bansos). "Dana BOS itu hanya untuk kebutuhan siswa, sedangkan dana utama dalam program ini adalah



dana yang dikeluarkan melalui petunjuk operasional dari Bupati yang kita sebut BOP," jelasnya.

Tasfirani mengakui, program itu sangat didukung masyarakat dan guru di Kabupaten Kayong Utara. "Kalaupun ada yang tidak mendukung, itu hanya sebagian kecil karena ketidakpahaman mereka dalam memaknai program gratis tersebut. Di dalam program ini, pemkab tidak menghilangkan peran serta masyarakat," tegasnya.

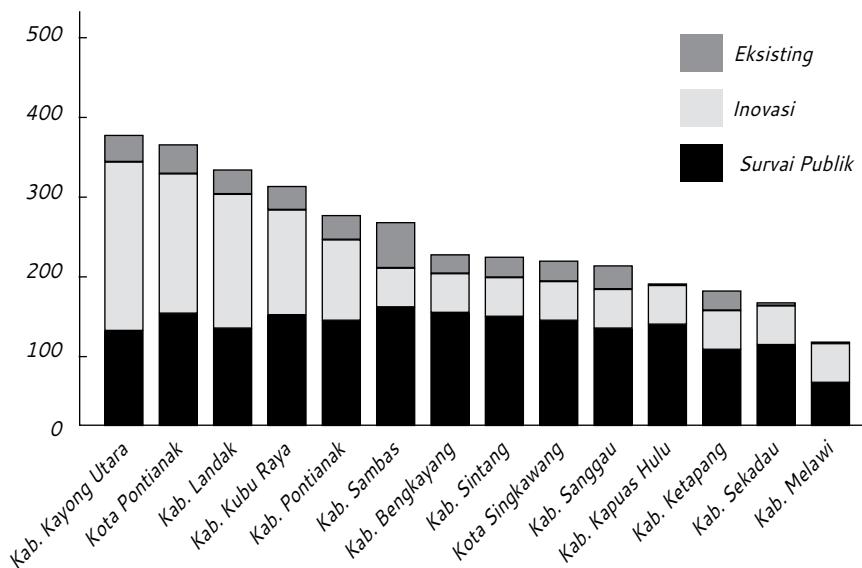
Asmadi, guru SMP Satu Atap Pulau Pelapis, menuturkan, program pendidikan gratis yang diluncurkan bupati Kayong Utara sudah sangat tepat dan patut dijadikan contoh oleh daerah lain. Dengan adanya program tersebut, kata dia, masyarakat kepulauan sangat terbantu dan merasa diperhatikan, meski keberadaan mereka sangat jauh dari ibu kota kabupaten.

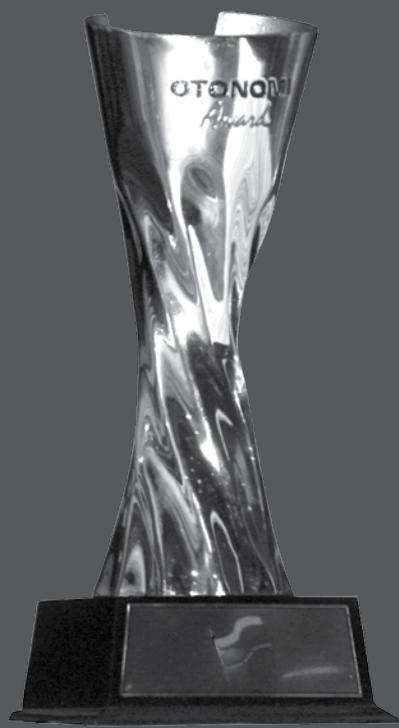
Untuk kesejahteraan guru, Asmadi tidak menafikan bahwa mereka memperoleh uang kesejahteraan pegawai dari bupati Rp 500 ribu setiap bulan ditambah tunjangan daerah terpencil sebesar gaji pokok. "Alhamdulillah, dengan adanya program ini, masyarakat sangat terbantu. Kami berharap program ini terus ada," ujarnya.

Dalam periode kedua kepemimpinannya, Hildi kembali membuat terobosan dengan meluncurkan program 10 sarjana setiap desa. Untuk

menciptakan SDM yang andal, Hildi menjajaki kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan universitas di Kalimantan Barat dan Kepulauan Jawa. "Saya ingin nanti ada 340 sarjana dari 34 desa untuk mendongkrak SDM Kabupaten Kayong Utara ke depan. Kita akan punya minimal 10 sarjana di setiap desa tersebut," ungkap bupati yang juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar itu. (**)

PELAYANAN PENDIDIKAN





— KABUPATEN —
LANDAK

**KABUPATEN
LANDAK**

*Peraih Otonomi Award
Indikator Pelayanan Kesehatan*



Masyarakat Sehat Lewat Jamban dan Pamdes



Program Masyarakat Sehat Lewat Jamban dan Pamdes berhasil meraih OA Kategori Pelayanan Kesehatan. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot (empat dari kiri) bersama staf usai menerima penghargaan.

Capaian kinerja bidang layanan publik sektor kesehatan di Kabupaten Landak mengantarkan daerah itu berhasil menyabet penghargaan di bidang pelayanan kesehatan. Program Jamban Sehat dan Pamdes (Penyediaan Air Minum Desa) di Kabupaten Landak meraih penghargaan dalam malam anugerah Otonomi Awards (OA) 2013.

Program yang diinisiasi sejak 2008 ini didasari tingginya angka perkembangan penyakit diare sebesar 9,05 persen di lima desa sebagai akibat pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) melaksakan program Jamban Sehat dan Pamdes (Penyediaan Air Minum Desa). Secara umum, program itu bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah.

Pencapaian ditempuh melalui perbaikan kesehatan, termasuk perilaku hidup keluarga yang sehat. Salah satunya di Desa Raba. Sebelum ada program STBM di desa yang memiliki 477 kepala keluarga (KK) tersebut, hanya 201 KK atau 42 persen yang sudah memiliki jamban yang layak. Sebagian besar warga masih biasa buang air besar di sembarang tempat seperti di sungai, hutan, atau kebun.

Berdasar *memorandum of understanding* (MoU) antara pemerintah Indonesia dan ADB, mereka akan mendukung upaya pemerintah mengurangi berbagai permasalahan dan keterbatasan yang berkaitan dengan pelayanan air minum serta peningkatan pelayanan kesehatan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Keterbatasan pelayanan air bersih pedesaan di Kabupaten Landak tersebut mendorong Pemkab Landak untuk mengirimkan peminatan kepada pemerintah pusat.

Bekerja sama dengan ADB, program itu bersifat *sharing*. Bantuan yang diberikan tidak penuh. Hanya 80 persen. Sebesar 55 persen merupakan pinjaman dari ADB dan 25 persen berasal dari pemerintah. Sementara itu, masyarakat desa menyumbang 20 persen yang terdiri atas 16 persen berupa *sharing in-kind* (tenaga dan material) serta 4 persen berupa kontribusi tunai pada awal. Hal itu bertujuan agar masyarakat turut berperan serta akif dalam pelaksanaan program.

Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Landak demi tercapainya perbaikan derajat kesehatan masyarakat desa berupa penyediaan sarana air bersih, sanitasi yang lebih memadai, serta perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat. Target pelaksanaan program itu adalah 60 desa dengan realisasi sejak 2008. Sampai

2011, sudah tercapai 51 desa. Perinciannya, 2008 (5 desa), 2009 (12 desa), 2010 (14 desa), dan 2011 (20 desa). Program itu terus berjalan selama 2012 dan 2013 untuk mencapai target 60 desa tersebut.

Desa yang berhak mendapatkan bantuan program itu dipilih dengan menggunakan pola pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Pola pendekatan itu memiliki kriteria umum dan khusus untuk menentukan desa yang dipilih. Kriteria umum adalah angka kemiskinan, cakupan sarana air bersih, cakupan sarana sanitasi, jumlah penduduk, serta angka penyakit yang berhubungan dengan penggunaan dan penyediaan air selama satu sampai tiga tahun terakhir.

Kriteria khusus adalah komitmen masyarakat untuk mengubah perilaku buang air besar sembarangan. Selain itu, pernyataan minat dari masyarakat untuk mengikuti program tersebut, kesediaan menyiapkan rencana kerja masyarakat, kesediaan menyediakan kontribusi *in-cash* (uang tunai) sebesar 4 persen dari total biaya yang diusulkan, kesediaan untuk menyiapkan kontribusi *in-kind* (tenaga kerja dan bahan/material) sebanyak 16 persen dari total biaya yang akan diusulkan, serta kesediaan untuk melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem.

Proses awal yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah menyadarkan masyarakat dengan penunjukan *natural leader* dari warga desa. *Natural leader* itulah yang bertugas membantu Dinas Kesehatan menyadarkan warga untuk beralih ke pola hidup sehat. Penyadaran masyarakat desa merupakan salah satu tahap terberat. Sebab, kebanyakan warga desa yang telah terbiasa buang air besar (BAB) di sungai-sungai dan hutan tidak mau berubah. Pada awalnya, Dinas Kesehatan memberikan bantuan berupa kloset dengan harapan warga mau membangun WC. Namun, pemberian bantuan itu menjadi sia-sia karena tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

Grace, salah seorang *natural leader* dari Desa Raba, memiliki cara yang cukup ampuh untuk mengubah pola hidup warga di desanya. Cara yang dilakukan adalah membuat sebuah WC di samping rumahnya. WC tersebut boleh digunakan warga sekitar di desa tersebut. Tujuannya, warga yang



Warga menunjukkan jamban sehat hasil dana bergulir kepada peneliti PPIP.



Kondisi jamban sehat pasca program.

pernah menggunakan WC itu dapat merasakan manfaatnya dan sadar akan pentingnya kebersihan bagi kesehatan.

Ternyata, cara Gracea itu cukup efektif. Sekarang warga Desa Raba sudah memiliki WC sendiri di setiap rumah. Tidak hanya di Desa Raba, praktik itu juga berdampak ke desa-desa lain. Kesadaran warga akan pentingnya kebersihan bagi kesehatan mulai muncul. Berkat kerja kerasnya, Gracea mendapatkan penghargaan dari bupati Landak berupa uang tunai.

Uang tunai itu tidak digunakan Gracea untuk kepentingan pribadi, tetapi dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk pembuatan jamban. Jadi, bagi warga yang ingin memiliki WC yang sehat tetapi belum memiliki biaya, mereka dapat menggunakan dana bergulir itu lebih dahulu. Kemudian, mereka bisa mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga.

Upaya itu cukup ampuh dalam mendorong warga Desa Raba untuk memiliki jamban. Hal itu terbukti dari meningkatnya akses KK terhadap jamban sehat. Sebelum ada penyadaran, di desa itu hanya ada 359 KK yang memiliki akses jamban sehat. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 1.540 KK. Akses jamban sehat juga telah meningkat 57,19 persen.

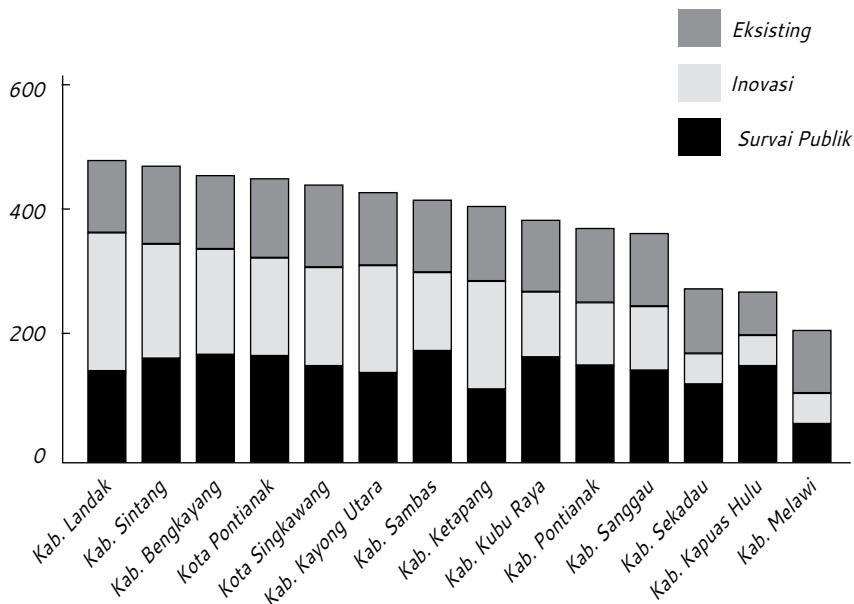
Tidak hanya berhenti di situ, Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Kesehatan juga menjalankan program Penyediaan Air Minum Desa (Pamdes). Warga bergotong royong membangun sarana air bersih untuk desa dengan membangun tower penampung air bersih. Air bersih tersebut kemudian dialirkan dengan sistem perpipaan gravitasi. Warga bisa mendapatkan air bersih melalui keran umum yang telah disediakan. Penggunaan keran umum kemudian dirasa kurang efektif. Akhirnya, warga bermusyawarah untuk memperbarui sistem penyaluran air bersih tersebut agar bisa diakses dengan mudah.

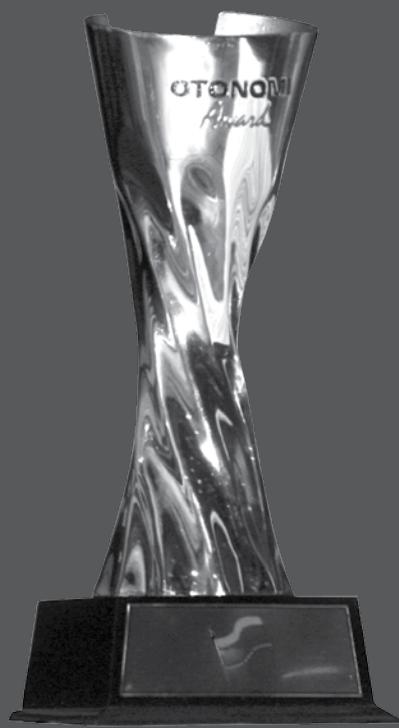
Berdasar hasil musyawarah, diputuskan bahwa sistem gravitasi yang selama ini digunakan dimodifikasi agar air bisa langsung dialirkan ke setiap rumah warga di desa. Untuk perawatan jaringan air bersih yang sudah ada, setiap warga yang menggunakan fasilitas air bersih dikenai biaya Rp 5 ribu per bulan.

Biaya itu kemudian digunakan untuk memperbaiki jaringan pipa apabila

terjadi kerusakan. Dengan demikian, warga tidak perlu lagi mengharapkan bantuan jika terjadi kerusakan jaringan pipa air bersih. Hingga saat ini, 100 persen warga Desa Raba sudah memiliki jamban permanen. Pola hidup mereka telah berubah menjadi lebih sehat. Selain itu, masyarakat sudah bisa mengonsumsi air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Yang juga membaik, angka insiden penyakit diare di desa tersebut berkurang. (**)

PELAYANAN KESEHATAN





— KABUPATEN —
BENGKAYANG

**KABUPATEN
BENGKAYANG**

*Peraih Otonomi Award
Indikator Pelayanan Administrasi Dasar*



Pelayanan Perizinan Prima di Bumi Sebalu



Kabupaten Bengkayang menerima OA Kategori Pelayanan Administrasi Dasar berkat program Pelayanan Perizinan Prima BP2T. Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Agustinus Naon (enam dari kiri) bersama dengan pimpinan KINERJA-USAID Elke Rapp (empat dari kanan) dan perwakilan USAID Indonesia Blair King (kanan).

Dalam Otonomi Awards 2013, Kabupaten Bengkayang berhasil menyabet penghargaan yang diberikan Pontianak Post Institute Of Pro-Otonomi (PPIP) melalui parameter pelayanan publik kategori pelayanan administrasi.

“Kami Ada untuk Melayani”. Itulah moto Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bengkayang. Moto tersebut tentu memiliki makna bahwa BPMPPPT berkomitmen tinggi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat diproses atau tidak bisa diproses sesuai dengan prosedur, persyaratan, target penyelesaian, dan kepastian biaya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPMPPPT Kabupaten Bengkayang berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengeluarkan berbagai perizinan di kabupaten tersebut. Salah satunya memberikan pelayanan dengan cepat, ramah, mudah, dan transparan serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis di Bumi Sebalo.

Di samping itu, tugas terpenting BPMPPPT adalah memberikan pelayanan publik dengan menempatkan seluruh proses perizinan secara terpadu yang dikelola di bawah satu pintu (*one stop service*). Dengan demikian, prosedur pelayanan perizinan dapat disederhanakan sehingga menjadi semakin mudah, cepat, transparan, bermutu, berkepastian hukum, memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, terbuka, akuntabel, serta ada persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Selain itu, ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal, pemerintah telah menetapkan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pelayanan di bidang perizinan penanaman modal berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan sebagai relasi antara pemerintah dan warganya. Itulah salah satu indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi *good governance* atau belum.

“Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat memotong kerumitan birokrasi sehingga mempercepat proses perizinan usaha

bagi para investor. Tujuannya adalah merampingkan dan mengonsolidasi jumlah langkah serta tempat yang harus dikunjungi seorang investor untuk memperoleh izin-izin usahanya,” ujar Paulus Anwardi, kepala BPMPPPT.

Dia menerangkan, pembentukan pelayanan terpadu satu pintu itu bertujuan untuk menyederhanakan prosedur layanan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus izin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu, kewenangan diberikan kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya.

“Yang dimaksud dengan pelayanan satu pintu adalah keluar masuk izin berkas di situ juga. Mengurusnya pun sangat mudah. Pemohon datang ke loket informasi. Selanjutnya, pemohon diberi *check-list* berupa form persyaratan yang diminta. Setelah melengkapi persyaratan, pemohon dapat menyerahkan berkas beserta *form* yang diberikan sebelumnya kepada petugas. Apabila dinyatakan lengkap, berkas akan diproses sesuai dengan lama waktu yang telah ditargetkan BPMPPPT. Apabila melebihi target waktu yang dikerjakan, BPMPPPT akan mengantar berkas pemohon tersebut ke rumah pemohon,” jelas Paulus.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan memudahkan proses perizinan bagi pengusaha yang akan berinvestasi dengan menjalani prosedur di Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Di sana, sebanyak 24 perizinan usaha dan tata ruang dapat dilayani dalam satu atap. Sebelumnya, memang ada 48 jenis perizinan. Tetapi, untuk memudahkan dan mempercepat proses, 48 jenis perizinan itu dipangkas menjadi 24 perizinan.

Perizinan tersebut, antara lain, izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha perdagangan, izin usaha toko modern, izin kesehatan, izin hotel, izin usaha industri, izin reklame, dan izin gangguan (HO). Sebelumnya, sejumlah izin tersebut dilayani berbagai dinas terkait. Misalnya, Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; serta Dinas Bina Marga dan Pengairan. Namun, untuk yang berskala lebih besar, perizinan harus ditandatangani kepala daerah. Hal itu disampaikan Kepala BPMPPT Paulus Anwardi.

Dia mengungkapkan, meski pelayanan perizinan diurus BPMPPT, sejumlah dinas terkait masih dilibatkan dalam pengawasan perizinan. Dengan PPTSP, menurut Paulus, BPMPPT hanya mempermudah proses perizinan secara administrasi.

Berdasar data 2011, BPMPPT Kabupaten Bengkayang sudah mengeluarkan 1.415 izin. Kemudian, ada peningkatan pada 2012 menjadi 1.596 izin. Bila dilihat dari data tersebut, mengapa sangat banyak izin yang dikeluarkan? Sebab, selama ini orang yang memiliki usaha tidak mempunyai izin. Setelah BPMPPT dibentuk dan disosialisasikan, masyarakat rupanya baru tahu bahwa usaha mereka harus memiliki izin dari pemerintah kabupaten. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan sudah terbuka.

"Dari 24 izin yang kami layani, hanya dua izin yang kami tarik biaya pembuatan izinnya, yaitu IMB dan HO. Pembuatan izin tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 14–20 hari kerja. Namun, hal itu juga bergantung pada perizinan yang diajukan pemohon. Biaya dan proses perizinan akan diinformasikan langsung kepada pemohon melalui *front office*," katanya.

Dalam kesempatan itu, Paulus juga menegaskan bahwa pihaknya terus menyosialisasikan PPTSP dan Peraturan Bupati Nomor 101/BPMPPT/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada BPMPPT. "Kami akan melakukan *road show* ke semua kecamatan untuk sosialisasi. Aparat kecamatan dan desa bisa meneruskan regulasi pelayanan perizinan kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan kegiatan itu, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Bengkayang bisa turut terdongkrak. Akhirnya, pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat melalui sektor retribusi serta peluang kerja masyarakat Kabupaten Bengkayang terbuka.

Paulus menambahkan, PPTSP tidak terlepas dari Perbup Nomor

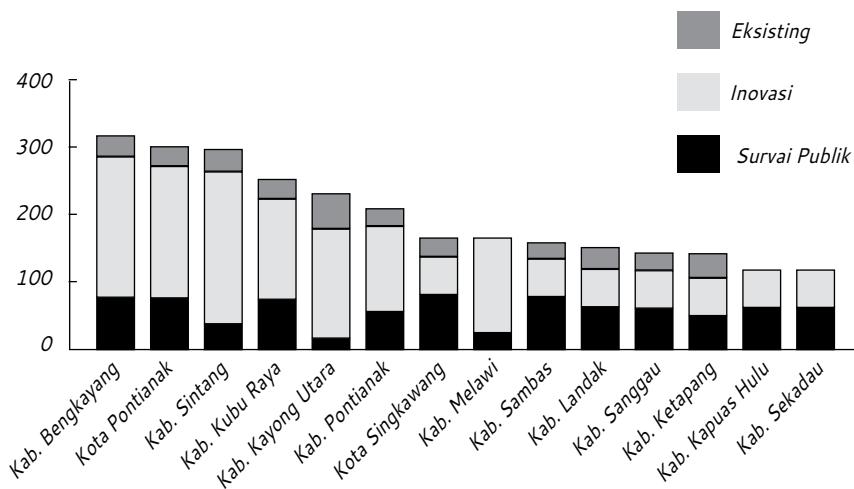
101/BPMPP/2013 yang mengatur pelimpahan kewenangan 24 jenis perizinan kepada BPMPP. Menurut dia, pelayanan satu pintu menjadikan mekanisme perizinan lebih mudah dan proses semakin cepat. "Asalkan, semua persyaratan dipenuhi pemohon sehingga tidak ada praktik pungli dalam pengurusan perizinan," tegasnya.

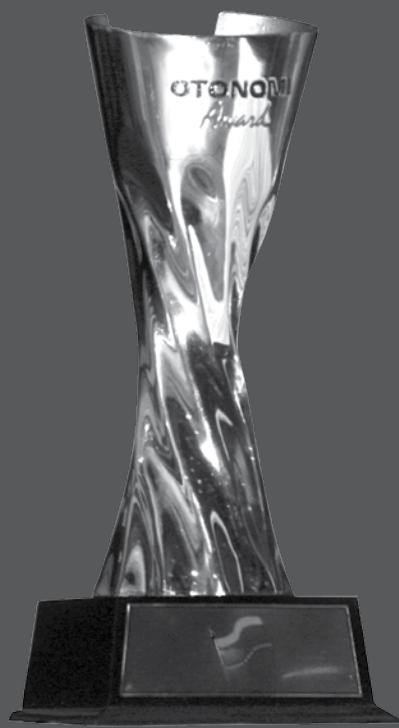
Namun, Paulus mengakui, masih ada kelemahan dalam pelayanan perizinan di instansi yang dipimpinnya. Pihaknya harus melibatkan tim teknis dari SKPD untuk menentukan apakah permohonan yang diajukan masyarakat bisa diizinkan atau tidak.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan BPMPP juga berupaya keras menekan praktik-praktik pungutan liar atau calo. Caranya, memublikasikan biaya pengurusan izin dengan memasang papan reklame (*billboard*) di titik-titik strategis. Salah satunya berada di Jl Basuki Rahmat, Bengkayang. Dengan adanya media seperti itu, masyarakat dapat mengetahui biaya dalam mengurus perizinan dan mereka bisa mengurus sendiri tanpa melalui calo.

Manfaat pelayanan perizinan tersebut telah dirasakan banyak warga. Salah satunya Marsianus Yordan. Sebelumnya, dia enggan mengurus izin usaha. Namun, setelah melihat dan membaca *billboard*, Marsianus langsung mengajukan izin untuk usahanya. "Awalnya, saya kira mengurus izin biayanya mahal. Tapi, ketika melihat baliho di jalan, ternyata tidak mahal. Cara menghitungnya pun dijelaskan di situ," ungkap Marsianus.

PELAYANAN ADMINISTRASI DASAR





— KABUPATEN —
SANGGAU

KABUPATEN SANGGAU

*Peraih Otonomi Award
Indikator Pertumbuhan Ekonomi*



Membangun Perekonomian Daerah lewat Desa Fokus



Program Desa Fokus mengantarkan Kabupaten Sanggau meraih OA Kategori Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Trofi tersebut merupakan kado terindah bagi Bupati Sanggau Setiman H Sudin (empat dari kiri) di akhir masa jabatannya.

Bumi Dara Nante. Itulah julukan Kabupaten Sanggau. Keseriusan Bupati Setiman H Sudin membangun Sanggau patut diacungi jempol. Buktinya, Sanggau berhasil menyabet satu kategori Otonomi Awards (OA) 2013 di bidang Pertumbuhan Ekonomi Lokal lewat program unggulannya, yaitu Desa Fokus.

Wilayah Kabupaten Sanggau sangat luas, hampir 12,47 persen luas Kalimantan Barat dengan kecamatan yang tersebar hingga ke wilayah perbatasan. Karena itu, perlu pemerataan pembangunan sebagai salah satu faktor utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah perlu ditunjang sarana dan prasarana yang baik demi tercapainya perekonomian daerah yang baik. Tidak sebatas itu, diperlukan pula sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu faktor penunjang untuk memperoleh target yang diinginkan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menggandeng seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melaksanakan program Desa Fokus.

Desa Fokus merupakan program percepatan pembangunan dengan menyinergikan seluruh SKPD di Kabupaten Sanggau dengan *stakeholder*. Tujuannya, mengoptimalkan pemberdayaan serta pembangunan yang berbasis pemerintahan desa dan kebijakan Bupati Sanggau Setiman H. Sudin yang tertuang dalam RPJM kabupaten ini. Diharapkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lebih terpadu, terarah, terkoordinasi, dan sinergis dalam pembangunan infrastruktur desa, peningkatan perekonomian, serta pengentasan kemiskinan dan buta aksara. Desa Fokus dijalankan menyusul langkah Pemkab Sanggau untuk mengubah paradigma pembangunan daerah tertinggal dari berbasis kawasan menjadi berbasis pedesaan.

Program tersebut menuntut kesiapan seluruh pemerintah daerah dan warga desa untuk mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas SDM di desa. Dengan demikian, mereka bisa berinisiatif, berinovasi, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemasyarakatan guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin prima.

Program Desa Fokus dilaksanakan mulai 2010 dengan berpegang pada Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009. Kegiatan itu diawali dengan perencanaan pada awal tahun lewat rapat koordinasi yang dipimpin bupati dengan mengundang seluruh SKPD, camat, kepala desa, perusahaan swasta, serta lembaga keuangan seperti bank dan koperasi.

Dalam pelaksanaan program itu, masing-masing SKPD yang telah ditunjuk mulai menjalankan kegiatan Desa Fokus sesuai dengan perencanaan awal, baik yang berupa kegiatan fisik maupun kegiatan nonfisik. Pada akhir

tahun, dilakukan observasi dan monitoring oleh BPM Pemdes ke setiap desa yang menjalankan program itu. Setelah observasi dan monitoring, disusunlah laporan tahunan Desa Fokus. Laporan itu digunakan sebagai acuan untuk perbaikan program pada tahun berikutnya.

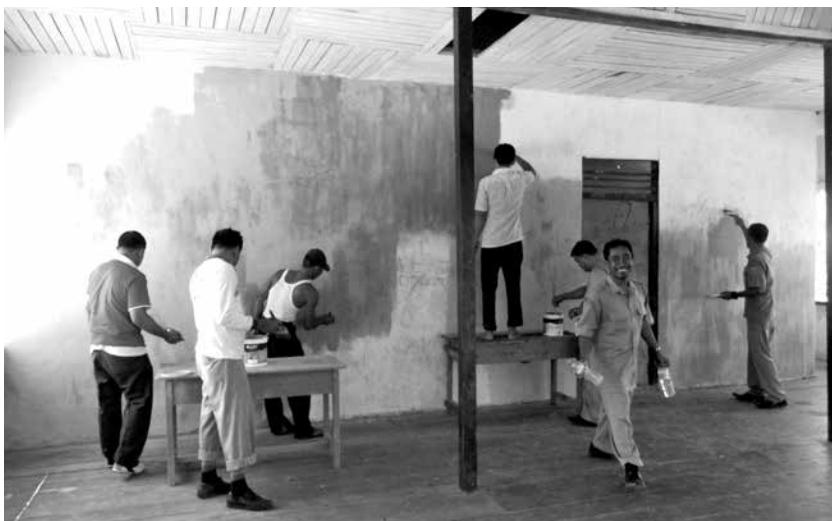
Kegiatan di Desa Fokus berupa pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik tersebut, antara lain, pembangunan jalan desa, balai desa, tempat ibadah, dan pembangunan atau perbaikan sekolah. Sementara itu, pembangunan nonfisik biasanya mencakup sosialisasi program pemerintah agar diketahui dan dipahami warga. Misalnya, program untuk kelompok tani, pelayanan kependudukan, dan KB.

Berbeda dengan pembangunan fisik yang dampaknya bisa langsung dirasakan, pembangunan nonfisik berdampak jangka panjang. Sebab, sasaran program nonfisik adalah perubahan *mindset*. Karena itu, pembangunan nonfisik tentu sangat penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Program dan kegiatan SKPD yang telah direncanakan masing-masing SKPD dan desa-desa yang terlibat dalam program itu dilaksanakan pada tahun berjalan. Jadi, jika belum bisa rampung, program bisa diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya. Sebab, program tersebut berdurasi tiga tahun.

Desa-desa lokasi program yang belum memiliki kantor desa menjadi prioritas untuk dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) sesuai dengan data yang disampaikan BPM Pemdes. Setiap Desa Fokus mendapat bantuan pembangunan balai pertemuan bagi desa yang disalurkan dari pos bantuan APBD ke rekening kas desa melalui APBDes. Pemenuhan personel di Desa Fokus juga menjadi prioritas. Misalnya, tenaga medis dan penyuluh pertanian.

Pemkab Sanggau melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah juga melaksanakan program untuk memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak di Desa Fokus. Yang mendapat bantuan adalah dua orang per desa. Untuk program itu, Desa Fokus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Tri Bhuwana Tunggadewi, Malang.

Saat ini, program Desa Fokus telah dilaksanakan di 132 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau. Pembangunan yang dilakukan tidak harus selesai dalam jangka satu tahun, tetapi dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, pembangunan memperoleh hasil yang maksimal. Dari penyelenggaraan Desa Fokus selama tiga tahun (2010 hingga 2013), sudah 104 desa merasakan dampak positif program Desa Fokus tersebut. Tidak hanya sampai di desa-desa itu, program tersebut dikembangkan lagi di 28 desa pada 2014.



Salah satu wujud partisipasi warga dalam Desa Fokus di Kabupaten Sanggau.



Kini, hampir seluruh desa yang menjadi tempat program Desa Fokus telah memiliki akses jalur darat yang baik antardesa. Begitu juga dengan bangunan sekolah yang layak. Program tersebut juga telah berhasil meningkatkan kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil itu bisa dilihat dari berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau, meningkatnya IPM, serta sudah terbebasnya warga dari keterisolasi.

Desa Fokus, Menghubungkan Desa Terisolasi



Program Desa Fokus di Kabupaten Sanggau berhasil mempercepat pembangunan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hasil program yang dijalankan sejak 2010 itu sudah dirasakan masyarakat. Berikut wawancara dengan Bupati Sanggau, **Setiman H Sudin**

Apa latar belakang program Desa Fokus?

Sanggau memiliki 163 desa dan 6 kelurahan. Juga, 107 desa yang dikategorikan desa tertinggal yang tersebar di 15 kecamatan. Saya dan Paolus Hadi berupaya menangani masalah desa tersebut dengan membuat sebuah kebijakan atau program khusus. Lewat program itu, kami ingin mengentas warga dari kemiskinan dalam segala aspek kehidupan. Masalah utamanya, antara satu desa dan desa lain masih terisolasi. Itulah latar belakang kami membuat terobosan melalui program Desa Fokus.

Apa sebenarnya tujuan program ini?

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pelayanan dasar. Ini menjadi pokok perhatian kami. Sebab, berdasar kondisi geografisnya, jarak antardesa dengan kota kecamatan serta kabupaten sangat jauh. Sementara itu, infrastruktur jalan tidak mendukung. Karena itu, angka kemiskinan tiap tahun tidak bisa dikurangi dengan maksimal. Pelayanan dasar serta pembangunan oleh pemerintah juga tidak bisa berjalan secara kontinu.

Mengapa program ini dinamakan Desa Fokus?

Program ini kami namakan Desa Fokus karena yang difokuskan adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan serta pembangunan yang berbasis pemerintahan desa dan masyarakat. Program Desa Fokus merupakan program bersama (*keroyokan stakeholders*, terutama SKPD Sanggau, untuk mendorong dan memotivasi pembangunan di desa secara bertahap setiap tahun (2010–2014) yang diarahkan pada pembangunan fisik dan nonfisik. Program Desa Fokus juga merupakan langkah untuk menyinkronkan serta menyinergikan anggaran, baik ADD, APBD, APBD provinsi, DAK, maupun dana dekonsentrasi yang diberikan kepada daerah.

Sejak kapan program ini dilaksanakan?

Persiapannya 2009. Action-nya 2010 dengan target 18 Desa Fokus. Dasar pelaksanaan program Desa Fokus adalah SK Bupati Nomor 363 Tahun 2009. Sampai 2013, Desa Fokus sudah dilaksanakan di 104 desa dan meningkat menjadi 132 desa pada 2014. Desa Fokus ini tidak hanya dilaksanakan di desa tertinggal, namun juga di desa lain. Program ini tersebar di 15 kecamatan.

Apa kendala pelaksanaan program ini?

Pertama, masyarakat belum memahami dan masih beranggapan bahwa pembangunan hanya dilakukan pemerintah. Karena itu, mereka hanya perlu bergotong royong. Kedua, masalah anggaran. Tahun pertama, kecamatan hanya mendapatkan dana yang jumlahnya terbatas. Karena itu, sosialisasi dan monitoring program Desa Fokus tidak bisa intensif sehingga laporan yang diberikan sering bersifat normatif. Data pendukungnya pun sangat minim. Belum lagi terbatasnya sarana dan infrastruktur serta kondisi geografis desa yang berjauhan sehingga menyulitkan pembinaan oleh tim kabupaten.

Setelah tiga tahun, apa hasil program Desa Fokus?

Tentu sangat ada dan menggembirakan. Misalnya, mampu menyejahtera-kan warga. Selain itu, ekonomi lokal tumbuh sangat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum adanya program ini. Buktinya, angka kemiskinan masyarakat di



Wakil Bupati Sanggau Paulus Hadi (2009–2013) meresmikan program Desa Fokus di Desa Kampuh, Kec. Bonti, Kab. Sanggau pada 2013 yang lalu. Paulus Hadi kini menjadi Bupati Sanggau.

Sanggau berkurang. Kemudian, terjadi peningkatan IPM dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Lalu, yang tidak kalah menggembirakan, masyarakat desa terlepas dari keterisolasi karena adanya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di desa tersebut.

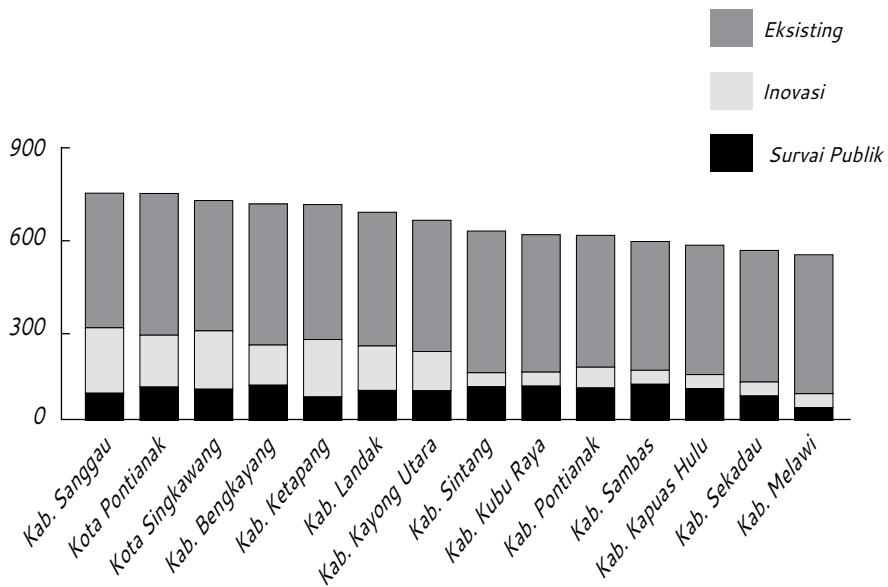
Sejauh apa program Desa Fokus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi?

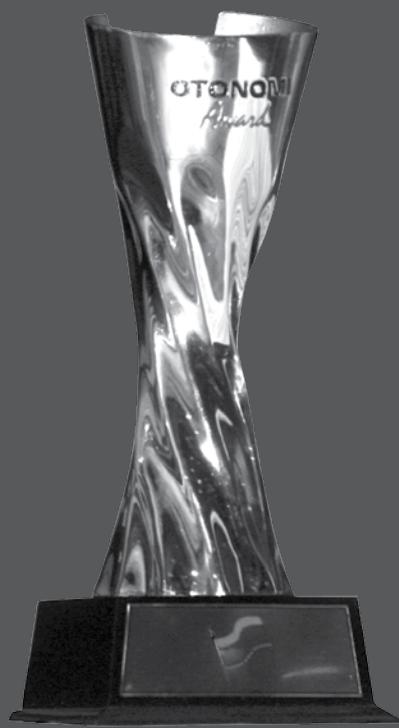
Yang pasti, dengan adanya program Desa Fokus ini, ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Sanggau meningkat. Faktanya, dapat dilihat secara fisik, pembangunan rumah penduduk semakin baik. Selain itu, sarana transportasi darat dan air sangat lancar. Walaupun di sebagian daerah kondisi jalannya tidak begitu baik, masyarakat bisa mudah mengakses kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, penghasilan masyarakat juga semakin tinggi.

Pendapat Anda tentang Otonomi Awards?

Sangat baik. Sebab, penilaian Otonomi Awards ini dilakukan pihak yang sangat independen. Jadi, mereka dapat memberikan *input* yang sangat baik bagi daerah yang mendapat *award* maupun daerah yang tidak. Dengan demikian, daerah bisa melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing.

RANGKING PERTUMBUHAN EKONOMI





„KABUPATEN“
KUBU RAYA

**KABUPATEN
KUBU RAYA**

*Peraih Otonomi Award 2013
Indikator Pemerataan Ekonomi*



Armada Semut, Membuka Akses Kehidupan Nelayan Kecil



Maria Agustina, Kepala BP2T Kabupaten Kubu Raya (berjilbab) menerima Otonomi Awards (OA) 2013 dari PPIP. Kubu Raya menjadi jawara di bidang Pemerataan Ekonomi untuk Program Armada Semut.

Kabupaten Kubu Raya berhasil meraih piala silver Otonomi Awards dari *Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi* (PPIP). Kabupaten ini mendapat anugerah sebagai Daerah dengan Terobosan Menonjol dalam Pemerataan Ekonomi. Apa saja terobosannya?

Empat puluh persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Kubu Raya (760 km^2) merupakan daerah pesisir dan kepulauan. Di wilayah pesisir dan kepulauan itu, tingkat kemiskinan masyarakatnya berada di level paling bawah jika dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain di kabupaten yang dipimpin bupati termuda di Kalimantan Barat tersebut.

Kondisi itu dilatarbelakangi keterbatasan akses bagi masyarakat di pesisir dan kawasan yang hanya dapat disentuh dengan alat transportasi sungai. Akibatnya, bukan hanya permasalahan akses di bidang kehidupan ekonomi, seluruh aspek kehidupan mereka seperti pendidikan dan kesehatan sangat “terbelakang”.

Tidak dapat dimungkiri, membuka akses selebar-lebarnya merupakan solusi yang terbaik untuk mengantarkan masyarakat pesisir dan tepian sungai ke kehidupan perekonomian yang lebih baik. Pengadaan alat transportasi dan berbagai sarana-prasarana pendukung lainnya telah diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya (KKR) melalui program pemerataan kehidupan ekonomi. Program tersebut dipelopori Dinas Perikanan dan Kelautan yang bekerja sama dengan instansi terkait, masyarakat setempat, serta pihak-pihak lain.

Terobosan Pemkab Kubu Raya itu disambut positif masyarakat pesisir yang hidup di garis pantai sepanjang 149 km. Bahkan, mereka berinisiatif memberikan nama inovasi itu: Armada Semut.

Itulah nama yang diusung dengan rasa bangga oleh masyarakat nelayan di sepanjang bibir pantai KKR untuk kegiatan inovasi pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan eksistensi diri bahwa mereka, nelayan berperahu kecil, juga memiliki peran yang tidak kalah penting jika dibandingkan dengan kapal-kapal penangkap ikan berkapasitas besar (armada kakap) dalam sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan daerah KKR.

Pemkab Kubu Raya memprakarsai suatu kegiatan yang tidak hanya difokuskan pada segmen yang memberikan kontribusi sangat besar kepada daerah. Melainkan, mata panah dibidikkan ke titik-titik permasalahan yang justru timbul sebagai penghambat kemajuan pembangunan serta

pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Ketimpangan pembangunan berusaha dikurangi sedemikian rupa. Memicu pertumbuhan ekonomi nelayan kecil yang mungkin oleh daerah lain dianggap hanya mampu memberikan sedikit keuntungan bagi daerah dan menjadi momok nilai-nilai prestisius kemajuan yang diberi stigma kumuh, bodoh, miskin, berpenyakit, serta terisolasi. Namun, mereka justru berbalik menjadi tumpuan harapan dan mesin penggerak kehidupan ekonomi daerah tersebut, seperti halnya hakikat semut-semut pekerja yang tidak henti-hentinya bahu-membahu berproduksi.

Kebijakan Bupati KKR Muda Mahendrawan dalam pemerataan kehidupan ekonomi bagi masyarakatnya tidak sekadar membagi kue sama rata, melainkan lebih mementingkan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan pembangunan ekonomi, terutama kepemilikan aset dan akses. Dalam hal ini, suatu daerah/kawasan belum tentu memiliki kebutuhan, potensi, dan permasalahan ekonomi yang sama dengan daerah/kawasan lain. Karena itu, peran otonomi daerah sangat diperlukan untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Di sini, pemerataan kehidupan ekonomi tidak dilihat sebatas hasil pertumbuhan ekonomi semata. Lebih jauh dari itu, pemerataan pembangunan menjadi indikator penentu keberhasilan kebijakan yang meliputi proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana serta berkelanjutan.

Kembali pada program unggulan kabupaten ini. Bagi masyarakat nelayan, Armada Semut ibarat setetes air di Padang Sahara. Pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi kehidupan nelayan sebagai wujud kemudahan kepemilikan aset. Namun, Pemkab Kubu Raya juga mengubah *mindset* masyarakat pesisir untuk menjadi produktif. Mereka dibekali keahlian untuk mengelola potensi yang dimiliki. Selama ini, masyarakat sebatas menggantungkan nasib pada ketersediaan sumber daya alam dan berbagai bantuan atau pinjaman dari pemerintah maupun swasta.

Bukan hal yang mudah untuk mengubah *mindset* dan kebiasaan masyarakat yang sudah beratus-ratus tahun tertanam dari generasi ke generasi tersebut. Karena itu, Pemkab Kubu Raya berusaha keras memutus tradisi yang menjadi belenggu bagi kemajuan masyarakat pesisir tersebut. Contohnya, program Armada Semut tidak sebatas memberikan pemerataan kue pembangunan. Melainkan, menekankan proses pembelajaran dan produktivitas dalam usaha membuka akses serta kesempatan untuk mandiri.

Program Armada Semut diberikan sejak 2010 berupa perahu kayu. Selama ratusan tahun masyarakat Kubu Raya mengenal tradisi pembuatan perahu kayu secara gotong royong. Keterbatasan bahan dasar kayu menjadi kendala terbesar masyarakat nelayan saat ini. Ditambah biaya perawatan yang relatif mahal setiap periode 68 bulan. Lama proses pembuatan, usia yang cukup singkat, dan beban yang berat bila dibandingkan dengan perahu berbahan *fiberglass* menambah beban nelayan kecil. Akibatnya, begitu banyak nelayan yang tidak memiliki armada sendiri. Mereka pun harus meminjam dari rekan atau memilih untuk memiliki aset perahu bersama yang digunakan secara bergiliran.

Kendala tersebut mendorong Pemkab Kubu Raya untuk memberikan bantuan perahu berbahan *fiberglass* yang dipercaya memiliki daya tahan yang lebih kuat, lincah, murah perawatan dan proses pembuatan, serta tidak mudah tenggelam dan patah. Tidak berarti dalam pelaksanaan program tidak timbul masalah. Mengingat, perahu itu hanya bisa didapatkan di Pontianak dan dimonopoli kalangan tertentu.

Selanjutnya, bantuan diwujudkan dalam bentuk pelatihan pembuatan armada berbahan *fiberglass* dan diberikan pula bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat perahu *fiberglass*. Setiap kecamatan dari lima kecamatan di pesisir pantai Kubu Raya ditawari untuk mendapat pelatihan tersebut.

Konsep dasar pelatihan tersebut adalah tetap menjaga tradisi gotong royong masyarakat nelayan dalam pembuatan perahu serta mendorong masyarakat agar mampu memproduksi armada mereka secara mandiri. Salah

satu contoh nyata keberhasilan program itu adalah Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kubu Raya. Mereka ke depan sudah berfokus pada produksi Armada Semut di luar kalangan mereka.

Untuk mekanisme program, masyarakat di kecamatan tersebut bisa mengajukan bantuan pelatihan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya. Setiap kelompok nelayan yang beranggota sekitar 10 orang bisa mengajukan bantuan bahan-bahan pembuatan perahu *fiberglass*. Kelompok itu lantas melanjutkan kegiatan dengan membuat perahu secara gotong royong. Mereka juga diwajibkan memiliki tabungan kelompok setiap bulan. Tujuannya, uang yang terkumpul bisa dimanfaatkan sebagai modal pembuatan perahu oleh anggota mereka yang belum memiliki armada. Atau, memperbaiki armada anggota kelompok yang sudah tidak layak. Itulah proses pembelajaran yang sangat efektif bagi pembangunan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Bantuan Armada Semut itu memberikan kontribusi positif bagi kemudahan transportasi nelayan. Bahkan, keluarga, istri dan anak mereka, ikut merasakan manfaat program tersebut. Dari yang sebelumnya hanya mempunyai sebuah aset armada, setelah mendapat bantuan program itu, aset keluarga nelayan tersebut meningkat menjadi beberapa armada.

Selain itu, akses bagi anak-anak mereka untuk sampai ke pusat pendidikan terbuka lebar. Ibu-ibu nelayan juga tidak lagi bergantung pada peran tunggal suami mereka dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan rumah tangga. Keterbukaan akses membuka peluang para istri nelayan mendapat penyuluhan pelatihan dan bantuan modal *home industry*, kesempatan cukup gizi dan pangan, serta akses penanggulangan masalah kematian ibu dan balita. Implementasinya, kehidupan rumah tangga menjadi tombak terdepan untuk menghancurkan stigma negatif yang melekat pada diri masyarakat pesisir.

Keberhasilan membuka akses lewat program Armada Semut ternyata berimbang pada proses memperkuat basis kehidupan rumah tangga masyarakat pesisir. Potensi ibu-ibu nelayan diasah dalam berbagai program

pengembangan. Bupati Muda Mahendrawan berpendapat, kaum ibu memiliki kepedulian yang lebih tinggi untuk memajukan keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Mereka selalu bersemangat menyambut berbagai bentuk pelatihan dan bantuan peralatan produksi yang ditawarkan pemerintah. Tanpa sokongan para istri, berbagai program bantuan pemerintah yang diberikan kepada bapak-bapak nelayan sering gagal dan salah sasaran. Karena itu, keterlibatan istri-istri nelayan tidak bisa diabaikan dalam penguatan dan kelanjutan program Armada Semut.

Setiap pelatihan dan bantuan peralatan seperti mesin penggiling ikan, pembuat tepung, serta pendingin dan pengering ikan yang diamanahkan kepada kaum perempuan itu sungguh-sungguh dijalankan dan dikembangkan. Contoh program yang mencuri hati mereka adalah pengelolaan ikan serta udang menjadi tepung dan kerupuk. Yang tidak kalah menarik, mereka diajari membuat kemasan ikan kering/asin dan terasi agar hasil produksi mereka bisa bersaing di pasar modern.

Ketika musim melaut tiba, hasil tangkapan nelayan melimpah ruah. Untuk mencegah hasil laut tebuang percuma, perempuan pesisir diberdayakan untuk mengelolanya menjadi produk-produk lokal yang bisa dipasarkan kapan saja tanpa dikejar batas waktu.

Pemanfaatan tanaman lokal pun menjadi incaran Pemkab Kubu Raya untuk mendongkrak potensi perempuan. Berbagai kegiatan pemberdayaan juga diberikan. Antara lain, produksi sirup buah bakau serta kerajinan tempurung kelapa dan kulit kerang. Kegiatan yang mengisi waktu luang ibu-ibu nelayan tersebut ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata. Kegiatan tersebut berhasil memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi keluarga.

Selain memandirikan kaum perempuan dalam pemanfaatan hasil laut dan tanaman lokal, ibu-ibu nelayan berpotensi menjadi garda terdepan keberlanjutan program Armada Semut melalui program unit koperasi simpan

pinjam. Program simpan pinjam bagi masyarakat nelayan tidak mampu itu diadopsi dari sistem Grameen Bank yang dipelopori Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh. Program simpan pinjam tersebut merupakan strategi Pemkab Kubu Raya untuk mengurai permasalahan masyarakat nelayan pada masa paceklik atau ketika kondisi angin tidak mendukung pelayaran nelayan selama 24 bulan.

Pada masa itu, mereka terbiasa meminjam uang untuk menafkahai keluarga atau mengutang berbagai kebutuhan hidup sehari-hari kepada tengkulak atau penyalur/pedagang ikan. Utang mereka itu baru bisa dibayar pada musim melaut dengan menjual hasil tangkapan ikan yang harganya telah ditentukan pemberi utang. Akibatnya, harga yang ditentukan itu sangat jauh dari harga pasaran sehingga merugikan nelayan. Itulah lingkaran setan yang terus menjerat kehidupan nelayan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup mereka. Melalui unit koperasi simpan pinjam, masyarakat yang diperankan ibu-ibu nelayan dididik dan dibiasakan untuk mengelola keuangan keluarga. Diharapkan, keluarga mereka terhindar dari jerat siklus utang piutang.

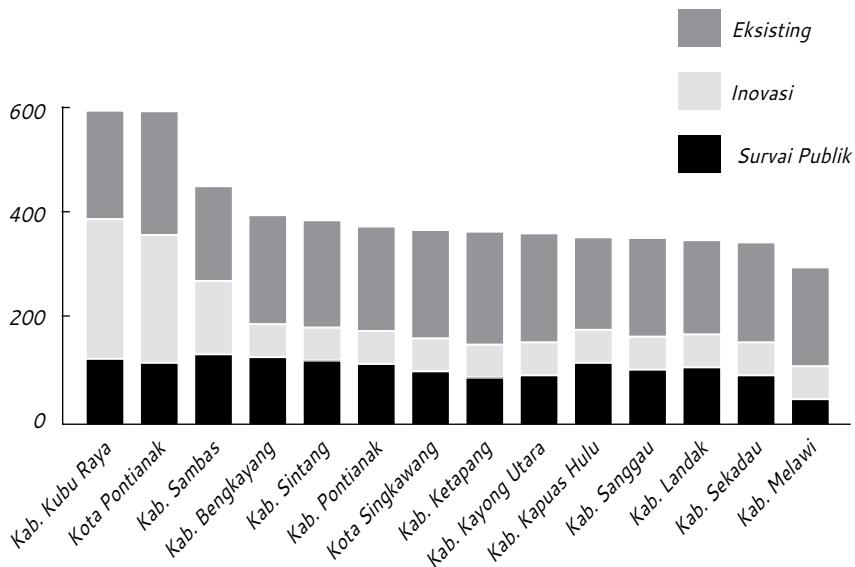
Yang tidak kalah penting dari keunikan program Armada Semut tersebut, perahu nelayan dilengkapi mesin Ben-Gas (*double fuel*). Mesin itu dirancang khusus menggunakan dua bahan bakar yang bisa dipilih nelayan. Pengembangan teknologi Ben-Gas itu bisa mengurangi beban nelayan ketika harga bensin dan solar naik. Mesin tersebut dapat dikonversikan secara langsung dari bahan bakar solar ke gas. Satu tabung gas berukuran 12 kg mampu menempuh perjalanan selama sepuluh jam dengan jarak tempuh lebih dari 200 kilometer. Targetnya, kesejahteraan hidup masyarakat bisa meningkat dengan penghematan bahan bakar perahu-perahu itu hingga empat kali lipat.

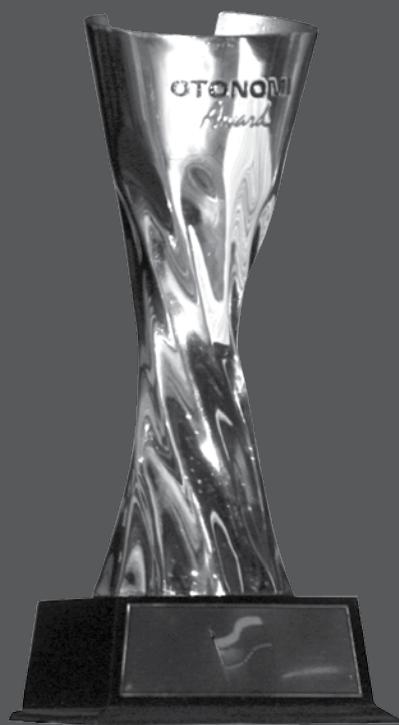
Lewat program Armada Semut, peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan dan pesisir didongkrak penuh melalui metode pembelajaran jangka panjang atau pembangunan yang berproses. Meski perlu waktu yang tidak singkat, dampak ke depan diyakini bisa menciptakan kemandirian warga pesisir dengan tidak lagi menggantungkan hidup pada alam serta pihak-

pihak tertentu yang sangat merugikan mereka.

Secara kuantitatif, program pemerataan kehidupan ekonomi bagi masyarakat pesisir di Kubu Raya itu berhasil meningkatkan pendapatan nelayan. Penghasilan mereka yang semula rata-rata per bulan Rp 650 ribu–Rp 1,2 juta meningkat menjadi Rp 1,3 juta–Rp 2,5 juta. Hasil tangkapan nelayan pun meningkat 18–27 persen. (**)

PEMERATAAN EKONOMI





— KABUPATEN —
SAMBAS

**KABUPATEN
SAMBAS**

*Peraih Otonomi Award Kategori
Pemberdayaan Ekonomi Lokal*



Bangun Fasilitas Penunjang Demi Kain Tenun



Asisten Kabupaten Sambas (empat dari kiri) Haji Sayuti menerima piagam Otonomi Awards (OA) 2013 untuk prestasi kabupaten ini di bidang pemberdayaan ekonomi lokal. Sambas mengungguli 13 kabupaten/kota lainnya di Kalbar dengan program tenun Sambas.

Malam Anugerah Otonomi Awards Sabtu (14/12/2013) menjadi sangat istimewa bagi Kabupaten Sambas. Pasalnya, daerah ini meraih dua trofi bergengsi sekaligus. Yaitu, trofi emas dan perak untuk indikator pemberdayaan ekonomi lokal. Pasca OA 2013 Kabupaten Sambas berhasil meraih nilai tertinggi untuk Kategori Kehidupan Ekonomi.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman suku bangsa itu menjadi ciri khas bangsa dan merupakan manifestasi dari unsur Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman suku bangsa tersebut memunculkan adanya perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan seperti budaya, bahasa, adat istiadat, kebiasaan, serta agama.

Masyarakat Melayu Sambas telah lama mengenal tenun. Kerajinan tenun Sambas merupakan tradisi turun-temurun yang masih ada hingga saat ini. Para perajin tenun Sambas sampai saat ini masih menjalankan tradisi tenun sebagai pengisi waktu luang, khususnya ibu rumah tangga. Kain tenun Sambas sangat bernilai ekonomis karena hasil penjualannya bisa menopang kebutuhan hidup. Selanjutnya, tenun Sambas memiliki nilai estetika yang tinggi dari motif yang dihasilkan.

Dusun Semberang, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, merupakan sentra kerajinan tangan berupa kain tenun khas Sambas. Berbagai motif telah dihasilkan para penenun yang seluruhnya adalah kaum ibu di Desa Sumber Harapan. Tidak kurang dari ratusan motif kain sudah dihasilkan para perajin kain tenun Sambas ini. Dari segi kualitas, tenun ikat Sambas tentu telah mengalami perubahan yang sangat baik serta memiliki berbagai varietas.

Karena tuntutan konsumen, para perajin harus berpikir lebih inovatif dalam membuat kain tenun ikat itu. Tidak hanya dari segi motif, namun juga produk itu sendiri. Artinya, kain tenun ikat tersebut tidak hanya diproduksi berupa lembaran kain, namun juga dibuat peci, sabuk, selendang, sarung bantal, dan lain-lain.

Menurut Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi, latar belakang desa tenun berawal dari masuknya bantuan CSR PT Garuda Indonesia (GIA) bersama CitaTenun Indonesia (CTI) di bawah pimpinan Okke Hatta Rajasa di Desa Harapan pada 2010. Desa itu pun menerima pembinaan kerajinan tenun Sambas sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus pelestarian budaya.

Melihat antusiasme dan semangat masyarakat perajin tenun dalam menyambut program tersebut, PT Garuda Indonesia beserta CTI menyampaikan ide kepada Pemkab Sambas untuk menjadikan Desa Sumber Harapan sebagai sentra desa tenun. Sebab, dari hasil pembinaan, kualitas tenun dan minat masyarakat terus meningkat. Bahkan, penenun Sambas yang bekerja di Brunei dan Malaysia pulang ke Sambas untuk menenun.

Pemkab Sambas sangat siap menerima dan mendukung program tersebut. Sebab, itu merupakan salah satu daya ungkit peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya mendukung, Pemkab Sambas juga mengupayakan bantuan-bantuan berupa pelatihan keterampilan tenun, sarana-prasarana, PLTMH untuk desa tenun, dan pinjaman modal.

Yang juga lebih penting adalah memasukkan kerajinan tenun sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok) di sekolah. Diharapkan, setelah siswa lulus, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan modal keahlian menenun kain Sambas. Di samping itu, industri tenun kain Sambas yang saat ini mulai dilupakan masyarakat bisa terus berkembang.

Dalam kepemimpinan bupati perempuan pertama di Kalimantan Barat tersebut, pembangunan infrastruktur di Desa Sumber Harapan terus digalakkan. Tujuannya, akses mudah dijangkau. Selain itu, pemkab membangun *workshop* sebagai ajang wisata sekaligus pengenalan budaya bagi anak-anak dan pengaderan penerus budaya tenun. (**)

Disukai SBY, Dikenal di Inggris



Berkat andil Okke Hatta Rajasa, ketua Citra Tenun Indonesia (CTI), kain tenun Sambas pernah dipakai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga saat acara kenegaraan. Bahkan, SBY sangat menyukai motif kain tenun Sambas. Berkat jasa Okke Hatta Rajasa pula, kain tenun Sambas terkenal di Inggris. Lalu, seperti apa perhatian Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap kain tenun tersebut?

Berikut wawancara dengan Bupati Sambas **Juliarti Djuhardi Alwi**.

Bagaimana komitmen Anda untuk mewujudkan Desa Tenun?

Pemkab Sambas sangat siap menerima dan mendukung lokasi itu dijadikan Desa Tenun. Sebab, produktivitasnya mampu menjadi daya ungkit peningkatan ekonomi masyarakat.

Bantuan apa saja yang diberikan kepada penenun?

Banyak yang sudah kami bantu. Di antaranya, memberikan pelatihan keterampilan tenun, sarana dan prasarana, kelengkapan perbaikan masjid, PLTMH, serta modal. Kami juga membantu pemasaran sampai ke Jakarta.

Ini budaya bernilai tinggi. Bagaimana Anda melestarikannya?

Untuk melestarikan budaya ini, kami masukkan kurikulum di sekolah. Kami jadikan kerajinan menenun sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok). Kami juga memberikan bantuan komputer ke sekolah.

Setelah menjadi bupati, apa yang Anda lakukan untuk Desa Tenun?

Membangun infrastruktur di desa tersebut agar akses mudah. Kami juga membangun *workshop* yang nanti menjadi ajang wisata sekaligus



Salah seorang pengrajin perempuan di Dusun Semberang, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas sedang membuat tenun Sambas yang melegenda itu.

pengenalan budaya bagi anak-anak sesuai perencanaan Kabupaten Sambas. Selain itu, ada pengaderan penerus budaya tenun.

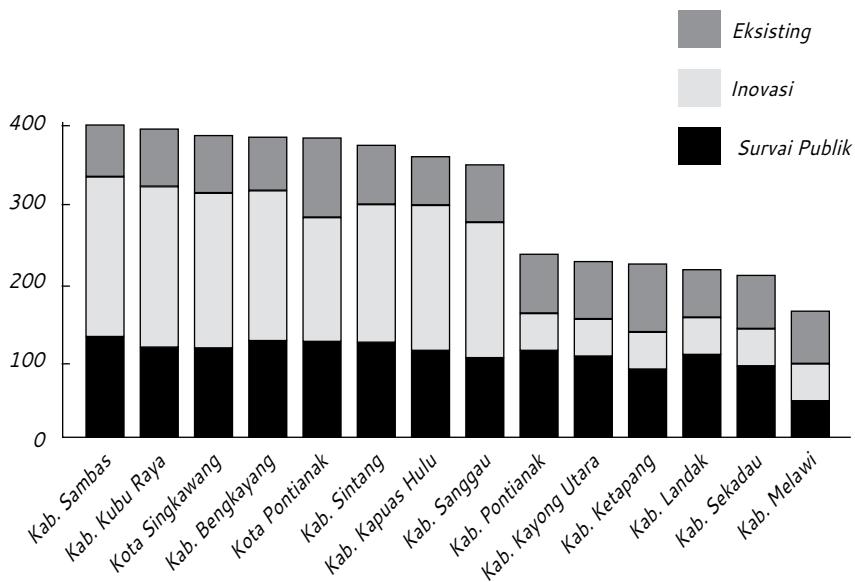
Apa saja kendala yang dihadapi?

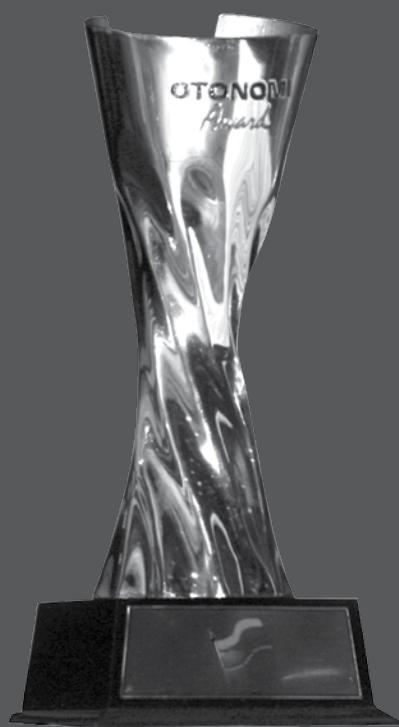
Terbatasnya dana. Selain itu, adanya ketidakpedulian generasi muda untuk menenun. Saya khawatir ini bisa punah kalau tidak ada regenerasi, terutama bagi kaum muda. Makanya, tenun kami jadikan mata pelajaran mulok di sekolah-sekolah di Sambas.

Apakah ada program promosi Desa Tenun?

Tentu ada. Sudah kami lakukan. Mulai ekspose di media, pameran skala lokal maupun nasional, hingga membangun tugu tenun. Kami juga berencana membangun galeri tenun serta sosialisasi langsung ke masyarakat melalui Majelis Adat Budaya Melayu (MABM). (**)

PEMBERDAYAAN EKONOMI





„ KOTA „
PONTIANAK

KOTA
PONTIANAK

*Peraih Otonomi Award Kategori
Akuntabilitas Publik*



Pemkot Pontianak Paling Transparan se-Kalbar



Pemerintah Kota Pontianak menjadi daerah paling transparan dalam mengelola keuangan di program Otonomi Award 2013. Dari kiri Kepala Bapeda Kota Pontianak Uray Indra, Asistem Bidang Kepemerintahan, Zumiati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Multi Junto Bhatarendro, Kepala BP2T Aminullah, Staf Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Syahdan, serta di apit oleh Petinggi dari KINERJA dan USAID untuk wilayah Indonesia usai menerima Otonomi Award 2013.

Sukses! Kata ini pantas disematkan kepada Pemerintah Kota Pontianak. Berkat program Transparansi Proses Perencanaan dan Penganggaran dengan inovasi berupa teknologi informasi yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kota Pontianak berhasil meraih penghargaan *silver* dan *gold* Otonomi Awards (OA) 2013. Seperti apa program paling transparan se-Kalimantan Barat itu? Berikut paparan peneliti *The Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi* (PPIP) Roossandra Dian Viejaya.

Kalau ditanya siapa orang yang paling bahagia di dunia saat ini, jawabannya tentu Sutarmidji. Mengapa? Pertama, dia menang telak saat pemilihan wali kota Pontianak periode 2014–2018. Ini adalah kemenangan kedua dia. Kedua, Sutarmidji tentu harus bahagia karena PPIP telah memilih dan menetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sebagai peraih trofi emas Otonomi Awards untuk parameter Kinerja Politik Lokal Indikator Akuntabilitas Publik.

Tidak banyak daerah yang tertarik untuk mengembangkan akuntabilitas publik. Padahal, indikator itu merupakan kunci keberhasilan daerah otonom untuk menjalankan amanah hak rakyat dalam sistem pemerintahan yang terbuka serta bersih. Penghargaan emas Otonomi Awards diberikan bersamaan dengan pelantikan jabatan periode kedua Sutarmidji sebagai wali kota Pontianak. Otonomi Awards dianugerahkan kepada Kota Pontianak karena implementasi *political goodwill* pemerintah daerah dalam mendorong isu akuntabilitas.

Isu Transparansi dan Akses Informasi Publik sudah didengung-dengungkan *The Jawa Post Institute of Pro-Otonomi* (JPIP) —salah satu penyokong OA PPIP—sejak lama sebelum UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diterbitkan. Selain itu, isu sanitari birokrasi dan responsivitas aparatur merupakan indikator akuntabilitas publik. Indikator itu menilai seberapa mampu pemda menanggung hak-hak rakyat otonom.

Peraih trofi emas Otonomi Awards 2013 untuk kinerja politik lokal ini menerobos pesaing lainnya melalui program Transparansi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Inovasi itu didukung teknologi informasi yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pada tahun pertama, pengoperasian teknologi informasi untuk sistem perencanaan didampingi pihak ketiga. Setelah pemkot mampu, program dijalankan secara mandiri. Program transparansi tersebut dapat diakses publik melalui website bappeda.pontianakkota.go.id atau pontianakkota.go.id yang melingkupi seluruh akses informasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Keunggulan program tersebut dapat diamati dari kecakapan Pemkot Pontianak dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung perencanaan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP). Pengadaan SIPP dapat mengurangi indikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil musrembang yang dianggap formalitas, sebatas memenuhi kewajiban pemerintah. Sistem itu juga memberikan solusi atas suatu masalah. Misalnya, usulan-usulan masyarakat yang hilang dan sulit dilacak serta perubahan usulan setiap tahun karena kegagalan inventarisasi data dan integrasi hasil-hasil usulan.

Bagi Pemkot Pontianak, pelaporan hasil musrembang melalui sistem teknologi informatika memberikan sisi positif. Seluruh proses perencanaan pembangunan, mulai tingkat bawah (kelurahan) hingga teratas (kota), bisa direkam dengan baik dalam *database* sistem informasi untuk mengurangi risiko kehilangan data dan usulan titipan. Dengan demikian, SKPD lebih mudah memantau hasil musrembang tingkat kelurahan-kecamatan dan mengintegrasikannya dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Ketidaksesuaian antara RKPD dan APBD yang akan ditetapkan juga dapat ditangani.

Sistem tersebut mendukung transparansi perencanaan pembangunan. Publik dapat mengidentifikasi riwayat suatu kegiatan. Asal usul suatu kegiatan, kapan dan siapa yang mengusulkannya, serta fase terbentuknya kegiatan baru dapat dilacak warga secara mudah lewat sistem *online*.

Manfaatnya, peran serta masyarakat dalam perencanaan sangat penting untuk mengontrol sejauh mana usulan-usulan warga dapat diakomodasi Pemkot Pontianak. Ada sisi pembelajaran, masyarakat ter dorong menggunakan hak suaranya untuk menuntut usulan-usulan yang belum bisa ditampung menjadi basis data perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Hal itu menjadi nilai tambah inovasi program Transparansi Proses Perencanaan yang digaungkan Pemkot Pontianak. Tujuan transparansi dapat dicapai karena terbukti memberikan efek kedewasaan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Tampak nyata di lapangan, partisipasi, kontrol, serta

kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan sangat penting. Hal itu juga membuat harga program pembangunan lebih murah.

Sesuai dengan pernyataan wali kota Pontianak, transparansi dalam perencanaan dan penganggaran merupakan solusi terbaik untuk memperoleh kepercayaan masyarakat atas kepemimpinannya. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kata dia, pemerintahannya tidak akan mampu menjalankan program-program kerja secara utuh. Masyarakat terbukti menyambut baik keberhasilan pemkot yang berani transparan.

Akibatnya, Bang Miji –sapaan akrab Sutarmidji– kembali dinobatkan untuk memimpin daerah ini untuk kali kedua. Transparansi dalam perencanaan memenuhi prinsip-prinsip ideal perencanaan. Yaitu, prinsip partisipatif masyarakat, kesinambungan, menyeluruh (*holistic*), mengandung sistem yang dapat berkembang, serta terbuka dan demokratis. Prinsip tersebut diperlukan dalam penilaian inovasi kinerja politik lokal untuk indikator akuntabilitas publik.

Nilai inovasi diberikan berdasar implementasi program tersebut di lapangan dengan melihat langsung perencanaan yang dimulai dari musrembang di tingkat terendah hingga tertinggi. Dinamika transparansi di situ ditelusuri. Setiap hasil musrembang di tingkat kelurahan, kecamatan, SKPD, forum SKPD, serta musrenbang kota/kabupaten dan selanjutnya RKPD, KUA-PPAS, serta proses penganggaran dimasukkan dalam *web-based information system*.

Partisipasi masyarakat dalam pengajuan usulan serta kontrol masyarakat dan pemerintah terhadap pelaksanaan usulan tersebut dipandang perlu dalam penilaian. Masyarakat yang tidak ikut dalam forum musrembang juga dimintai pandangan mengenai kemudahan dalam mengakses kegiatan itu pada ikon Laporan Hasil Musrembang di situs pemkot.

Untuk mekanisme musrembang kelurahan, data usulan di-*input* secara *online*. Usulan berdasar prioritas lantas dikirim kepada musrembang kecamatan. Selanjutnya, sistem membuat *database* usulan yang belum dikirimkan sebagai usulan yang belum tertampung dan akan menjadi bahasan

pada musrembang kelurahan tahun berikutnya.

Dalam musrembang kecamatan, hasil usulan musrembang kelurahan yang telah dikirim melalui SIPP dapat dicetak langsung. Pembahasan *print-out* itu dilakukan untuk menyepakati program kerja (progja) prioritas kecamatan. Selanjutnya, hasil bahasan kembali di-*input* dan dikirim ke forum SKPD agar usul musrembang kecamatan bisa dibahas.

Saat musrembang kelurahan dan kecamatan berlangsung, setiap SKPD melakukan *input* data bahan-bahan usulan progja untuk tahun depan. Data tersebut merupakan usulan rencana kerja (renja) SKPD yang akan dibahas pada forum SKPD. Proses integrasi usulan musrembang kecamatan dan usulan renja SKPD menghasilkan renja SKPD. Selanjutnya, hasil forum SKPD digunakan sebagai bahan RKPD pada tahun berikutnya.

Bukan hanya transparansi dalam perencanaan, keistimewaan inovasi yang dimotori Bappeda itu justru terletak pada kearifan mereka untuk berbagi dokumen anggaran belanja. Keberanian itulah yang belum dilakukan pemkot/pemkab lainnya di Kalbar. Terbukti, dari nilai skor inovasi lima nomine, hanya Kota Pontianak yang berhasil mencapai nilai 333. Selebihnya, nilai inovasi itu diikuti Kabupaten Sambas (203), Kabupaten Pontianak (171), Kabupaten Kubu Raya (78), dan Kabupaten Bengkayang (78).

Transparansi anggaran merupakan poin penting dalam penilaian Otonomi Awards. Meskipun Bappeda baru memublikasikan ringkasan APBD PERDA dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada 2011–2013, inisiatif itu dapat membuka hati SKPD lainnya untuk menginisiasi terobosan keterbukaan penganggaran yang lebih dahsyat kepada publik. Sebagaimana yang dikatakan wali kota Pontianak yang mengklaim pemkot berhasil menghemat anggaran perjalanan dinas hingga Rp 4 miliar, setelah pemberian DPA kepada setiap SKPD pada akhir 2013, seluruh SKPD Kota Pontianak diwajibkan memublikasikan DPA tersebut kepada warga Pontianak.

Bersih, Transparan, dan Mudah Diakses Publik



"Setiap pemerintahan harus berani menciptakan sistem yang bersih dan transparan." Kutipan itu disampaikan Wali Kota Pontianak **Sutarmidji**. Lantas, seperti apa sistem keterbukaan yang berhasil memenangi trofi emas Otonomi Awards 2013 untuk parameter kinerja politik lokal pada indikator akuntabilitas tersebut?

Apa yang melatarbelakangi penerapan Transparansi Perencanaan dan Penganggaran, khususnya dalam SIPP dan publikasi ringkasan anggaran belanja (DPA)?

Ada dua hal. Pertama, membangun kredibilitas atau kepercayaan masyarakat. Transparansi anggaran merupakan kunci keberhasilan pemerintahan yang bersih. Tanpa kepercayaan masyarakat, pemerintah akan sulit merencanakan dan menjalankan roda pemerintahan. Kedua, kontrol masyarakat. Transparansi anggaran ke ranah publik akan menciptakan kesungguhan dan kehati-hatian bagi SKPD dalam merencanakan serta melaksanakan program kerjanya. Anggaran yang digunakan untuk membiayai program kerja bisa digunakan sepenuhnya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan derah dapat direalisasikan tanpa cela.

Apa strategi Anda untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan?

Saya fokus pada tiga hal saja. Pertama, perencanaan harus baik. Sebagai contoh, musrembang mulai tingkat kelurahan hingga kota mengakomodasi seluruh kebutuhan rakyat melalui partisipasi masyarakat. Hasil musrembang dapat ditelusuri pada program Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) di website Bappeda dan pemerintah kota. Kedua, aturan yang dibuat

harus transparan dan arif. Artinya, aturan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Apabila bertentangan dengan kondisi masyarakat, aturan harus segera diubah. Ketiga, belanja modal harus melewati layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dimonitor tim pengawas khusus.

Kendala apa yang dihadapi untuk memublikasikan seluruh laporan APBD?

Keterbatasan daya tampung internet, sedangkan APBD Kota Pontianak terdiri atas 1.000 halaman. Saat ini Bappeda bisa melaporkannya dalam bentuk Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PERDA. Namun, pemkot juga memuat laporan keuangan secara utuh di media cetak daerah. Salah satunya laporan bantuan.

Solusinya bagaimana?

Hasil musrembang dilaporkan secara utuh via website. Musrembang mulai tingkat kelurahan, kecamatan, SKPD, forum SKPD, dan musrenbang kota/kabupaten serta RKPD dan KUA-PPAS wajib dimonitor masyarakat umum. Manfaatnya, masyarakat dapat mengontrol dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi usulan-usulan penganggaran yang diakomodasi pemerintah. Pemerintah juga dapat berkomitmen menolak secara tegas segala "pesanan" dari kalangan elite tertentu di luar hasil musrembang yang menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam pembangunan.

Bagaimana menekankan kepada pejabat pemkot bahwa transparansi terhadap hasil musrembang adalah sangat penting dan sungguh-sungguh dilakukan?

Berdiskusi. Seluruh SKPD dikumpulkan dan diberi masukan, pandangan, serta contoh-contoh manfaat pemerintahan yang bersih dan terbuka. Selain itu, *reward and punishment* menjadi rangsangan bagi SKPD yang berhasil maupun belum tuntas menjalankan tugasnya. Hal itu berdampak pada penilaian kinerja dan BP3-nya, bahkan pemindahan tugas. Inspektorat berperan mengawasi tugas SKPD seperti pembuatan laporan anggaran tepat waktu. Penghargaan WTP merupakan hasilnya.

Apakah masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran?

Partisipasi masyarakat sangat bagus. Mereka mengawal dan mengawasi secara langsung hasil musrembang dalam pembangunan. Apabila hasil musrembang tahun lalu tidak direalisasikan, masyarakat diberi ruang untuk menuntut kembali dalam forum musrembang tahun selanjutnya. Itu merupakan kontrol yang sangat baik bagi pemkot untuk memajukan sistem transparansi dalam roda pemerintahan.

Terobosan Bappeda ini akan diikuti SKPD lainnya?

Terobosan ini harus diikuti SKPD lainnya. Laporan DPA SKPD akhir 2013 dapat diakses di masing-masing website SKPD. Saya sudah menegaskan, setiap SKPD yang lalai akan mendapatkan *punishment*.

Bagaimana dukungan anggota legislatif?

DPRD kota dan pemerintah berjalan harmonis. Dewan sangat mendukung program transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Karena itu, Pontianak berhasil memperoleh penghargaan WTP hingga dua kali. Harapannya, legislatif juga menjadi contoh bagi penggerak pemerintahan lainnya.

Sejak kapan Anda bertekad menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan?

Sejak mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Berbagai upaya dilakukan seperti mengurangi anggaran belanja pegawai melalui pembatasan perjalanan dinas dan penghapusan pengadaan mobil dinas. Implikasinya, PAD kota meningkat menjadi Rp 285 miliar pada 2013 jika dibandingkan dengan 2009 sebesar Rp 70 miliar.

Apakah inovasi tidak memengaruhi kerja pejabat pemkot?

Pemkot sudah terbuka dan menciptakan iklim pemerintahan yang

bersih. Semua kegiatan penganggaran berada dalam pengawasan BPK. Selama SKPD tidak melakukan indikasi korupsi, saya katakan kepada staf saya untuk tidak khawatir menghadapi pengawasan. Kami berani menolak tegas ancaman dari oknum tertentu yang ingin menggagalkan program-program kemasyarakatan.

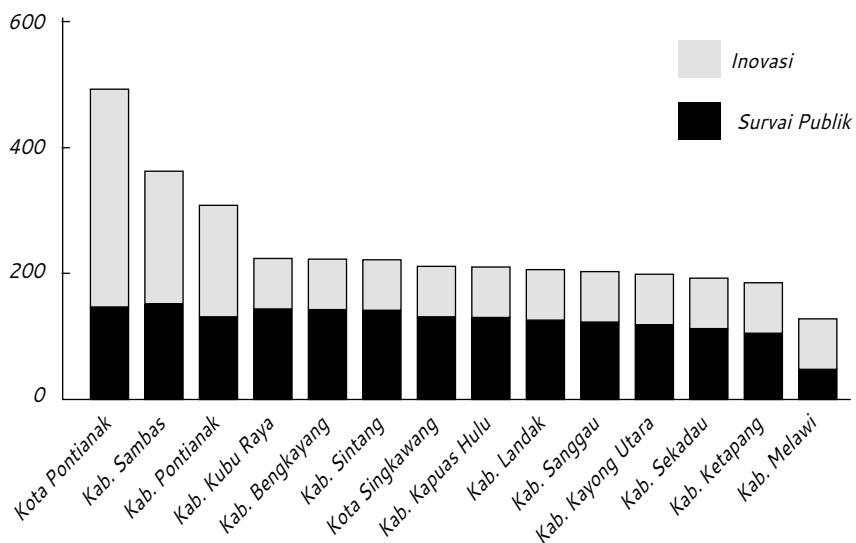
Apakah ada manfaat yang sudah Anda rasakan?

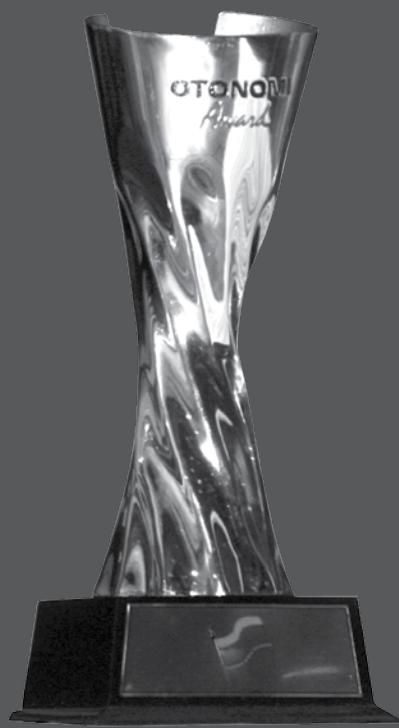
Secara personal, saya sudah merasakan dampak transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, yaitu kepercayaan masyarakat yang sangat besar. Manfaat lainnya, masyarakat semakin berpartisipasi mengontrol kami serta peduli menjaga dan memelihara hasil pembangunan.

Pendapat anda tentang monitoring dan evaluasi melalui Otonomi Awards?

Saya menilai, program ini sangat bagus karena didukung kriteria-kriteria penilaian monitoring dan evaluasi terstruktur. Saya berharap PPIP tetap melanjutkannya pada 2014. Saya yakin, dengan Otonomi Awards ini, karya inovasi melalui program kerja SKPD akan berkembang lebih banyak. Saya juga meminta hasil penilaian ini diajukan ke menteri dalam negeri. Dengan demikian, pemenang Otonomi Awards di Kalbar dapat dilanjutkan ke ajang Otonomi Awards di tingkat nasional. (**)

AKUNTABILITAS PUBLIK





— KABUPATEN —
SINTANG

**KABUPATEN
SINTANG**

*Peraih Otonomi Award Kategori
Partisipasi Publik*



Manajemen Desa Mandiri Harumkan Kabupaten Sintang



Di Otonomi Awards (OA) 2013, Kabupaten Sintang meraih penghargaan bidang Partisipasi Politik lewat program Manajemen Desa Mandiri. Bupati Sintang Milton Cosby (memegang piala) didampingi oleh Ketua DPRD (memegang sertifikat) usai menerima OA 2013.

Pemkab Sintang patut berbangga. Betapa tidak, setelah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), kabupaten bergelar Bumi Daranante ini sukses meraih Otonomi Awards 2013 dari *The Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi* (PPIP) untuk indikator Partisipasi Publik.

DUA gelar paling hebat itu tentu sudah membuktikan bahwa Pemkab Sintang memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan masyarakat dalam berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu, penghargaan tersebut menunjukkan respons masyarakat yang sudah sangat baik dengan tingginya partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Adalah Milton Crosby, sosok ramah nan penuh senyum, yang merupakan pemegang amanah rakyat Kabupaten Sintang untuk menjadi bupati. Dia sudah dua periode mengemban jabatan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kabupaten Sintang. Berbagai inovasinya telah berhasil memajukan Kabupaten Sintang. Mulai pembangunan infrastruktur, pembinaan pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi, pelayanan kesehatan, sampai pelayanan administrasi dasar kependudukan. Dari beberapa program inovatif tersebut, program pembangunan di tingkat terawah, yaitu pedesaan, dinobatkan PPIP meraih Otonomi Awards (OA) 2013.

Tingginya partisipasi masyarakat Sintang ditunjukkan lewat tingginya antusiasme publik dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pemekaran desa, meningkatnya alokasi dana desa (ADD), peraturan desa di hampir seluruh desa, serta berjalannya program Desa Mandiri secara efektif dan efisien.

Bupati Sintang Milton Crosby setelah menerima penghargaan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. "Ada tiga komponen yang memang harus saling melengkapi. Yakni, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Saya berterima kasih kepada semua pihak atas keberhasilan Kabupaten Sintang mendapatkan penghargaan Otonomi Awards 2013 ini. Karena itu, kita harus bersama-sama mempertahankannya pada tahun yang akan datang," papar Milton.

"Sebenarnya penghargaan ini bukan tujuan utama kita. Tapi, yang lebih penting adalah kualitas kinerja dan pelayanan Pemerintah Kabupaten Sintang yang akan kita tingkatkan menjadi lebih baik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan terus ditingkat agar semakin baik," lanjutnya.

Banyaknya desa di Kabupaten Sintang (183 desa pada 2007 menjadi 391

desa pada 2013) memacu Pemkab Sintang untuk membentuk kualitas sumber daya manusia di tingkat aparatur pemerintahan desa. Tujuannya, mencapai efektivitas anggaran dan menuju Pengelolaan Desa Mandiri. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemkab Sintang melalui kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) mencanangkan Program Pengelolaan Terstruktur Penganggaran Pembangunan Pedesaan (Pengelolaan Desa Mandiri).

Kepala PMPD Hendrika mengungkapkan, program manajemen Desa Mandiri tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Adapun mekanisme program itu, setelah ditetapkan dalam APBD, PMPD segera menetapkan pagu anggaran keuangan desa. Yaitu, anggaran dana desa (ADD), tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa (TPAPD), tunjangan penghasilan badan perwakilan desa (TPBPD), serta standardisasi untuk santunan kesehatan Kades, Parades, BPD, dan insentif untuk kepala adat/temanggung serta standardisasi perjalanan dinas, transportasi, serta pengadaan ATK yang berpedoman pada perbup. Untuk tahapan pelaksanaan ADD, TPAPD, TPBPD, dan lainnya pada Januari dan Februari, PMPD membuat jadwal turun ke kecamatan. Mereka juga mengundang Kades serta ketua BPD untuk hadir di ibu kota kecamatan dalam rangka pembagian pagu anggaran untuk masing-masing desa di setiap kecamatan.

Selanjutnya, program tersebut disinkronkan dengan pembinaan penyusunan APBDes pada setiap tahun anggaran. Dengan demikian, segala persoalan yang berkaitan dengan keuangan desa bisa disampaikan dalam acara tersebut sekaligus dicarikan solusi yang terbaik. Setelah pembagian pagu anggaran, pada Maret, tim dari DPPKA turun untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang masuk dalam APBDes. Selanjutnya, Kades menyampaikan rancangan perdes tentang APBDes kepada tim verifikasi kecamatan untuk kelengkapannya.

Kemudian, rancangan tersebut disampaikan kecamatan kepada bupati Sintang melalui DPPKA. Selanjutnya, usul diteruskan ke bagian hukum untuk dikoreksi. Setelah semua sesuai dengan ketentuan, Sekda Kabupaten Sintang menandatanganinya dan dimasukkan ke dalam berita daerah.

Adapun untuk pencairan ADD, TPAPD, dan TPBPD, yaitu pencairan

tunjangan Kades, Parades, dan BPD, pencairan dibagi dalam caturwulan atau empat kali dalam setahun. Sementara itu, pencairan ADD dilaksanakan dalam dua tahap. Yakni, tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen. Secara garis besar, program tersebut dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan tepat guna serta melalui evaluasi dan pelaporan yang ketat.

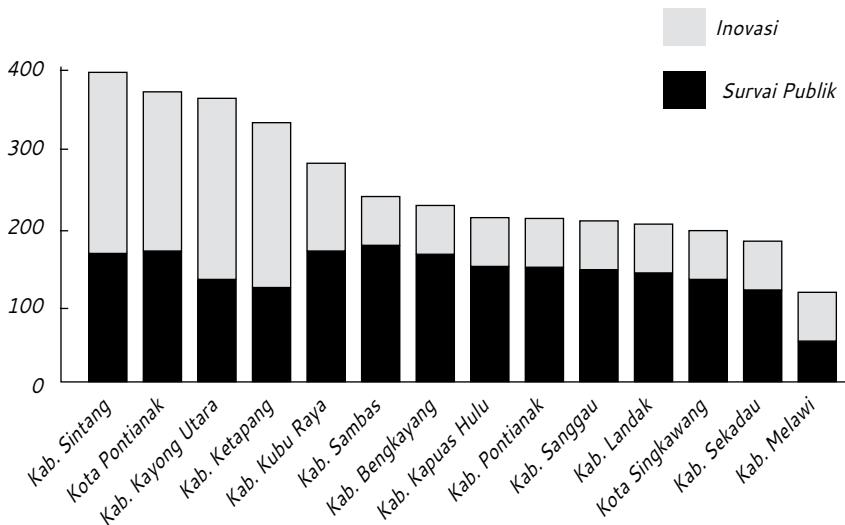
Anggaran yang digelontorkan Pemkab Sintang melalui APBD untuk program tersebut cukup signifikan. Yaitu, dari Rp 26 miliar pada 2007 meningkat menjadi Rp 59 miliar pada 2013. Dana disalurkan ke pedesaan sesuai dengan kebutuhan. "Adanya perencanaan yang matang, implementasi yang tepat guna, evaluasi, serta pelaporan yang ketat membuat program manajemen Desa Mandiri ini berjalan sangat efektif di sebagian besar pemerintahan desa di Kabupaten Sintang," ungkap Hendrika.

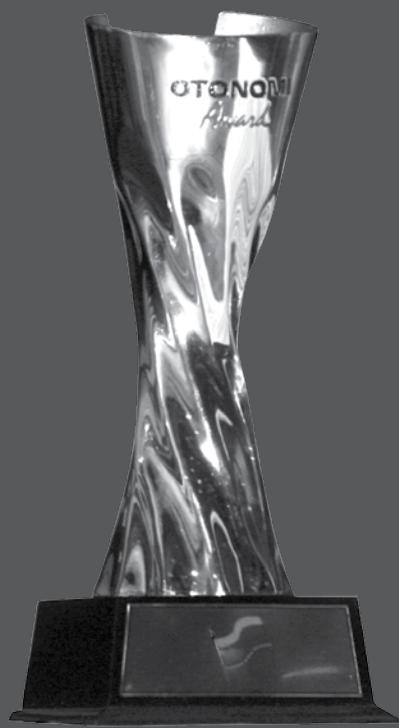
Dia juga menyatakan, dari tahun ke tahun, pengelolaan ADD di Kabupaten Sintang cukup bagus. Meski masih terdapat kelemahan dari kepala desa, itu masih dalam batas wajar. Persentasenya pun dari tahun ke tahun semakin kecil. Untuk 2012 yang merupakan tahun ketiga, ADD diberikan secara langsung oleh Pemkab Sintang kepada desa.

"Dari temuan kasus di lapangan, tidak terdapat penyelewengan dana yang terlalu menonjol seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, bisa diasumsikan bahwa penggunaan ADD sudah semakin baik, meski ada beberapa desa yang dari segi manajemen ADD masih harus diperbaiki," jelas Hendrika.

Pemkab Sintang berharap siapa saja, termasuk masyarakat, mengawasi pelaksanaan program di desa masing-masing. "Pengawasan mulai berjalan dengan adanya masyarakat yang melaporkan secara langsung ketika ada kejanggalan pemanfaatan ADD," kata Hendrika.

PARTISIPASI PUBLIK





— KABUPATEN —
KETAPANG

KABUPATEN KETAPANG

*Peraih Otonomi Award
Kategori Unik*



Hutan Kota Teluk Akar Begantung Paling Unik di Dunia



Plt Sekda Kabupaten Ketapang Mahyudin (memegang piala) menerima Otonomi Awards (OA) 2013 kategori unik. Inovasi hutan kota mengantar kabupaten ini meraih penghargaan unik dari PPIP.

Kabupaten Ketapang adalah kabupaten yang paling serius membangun hutan kota. Inilah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki hutan kota. Wajar kalau Ketapang mendapat penghargaan paling istimewa dalam Otonomi Awards 2013 yang diselenggarakan *Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi* (PPIP). Selain luas, hutan kota milik Pemerintah Kabupaten Ketapang ini bisa dikatakan paling unik di dunia.

TELUK Akar Begantung. Itulah nama hutan kota milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang. Hutan kota itu terbilang unik. Mengapa? Pertama, sangat dekat dengan jantung Kota Ketapang. Kalau menggunakan kendaraan, hanya butuh waktu paling lama 20 menit. Bahkan, banyak yang berjalan kaki sambil *jogging* untuk mencapai lokasi tersebut.

Kedua, memiliki lahan yang sangat luas, 106 hektare. Ketiga, memiliki isi yang luar biasa lengkap. Mulai flora sampai fauna. Keempat, selain daratan, hutan kota tersebut memiliki sungai dengan ikan yang luar biasa banyak. Karena paling dekat dengan kota, tidak salah lagi kalau kawasan itu sekaligus menjadi objek wisata.

Sejak dua tahun terakhir, 2012-2013, Unit Pelaksana Hutan Kota Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang mencatat, jumlah kunjungan wisatawan total mencapai 15.719 orang. Terdiri atas, 9.243 wisatawan pada 2012 dan 6.476 wisatawan pada 2013. Sebanyak 270 orang yang berkunjung berasal dari mancanegara.

Kepala Unit Pelaksana Hutan Kota Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang Bambang Rubminto menyatakan, Hutan Kota Teluk Akar Begantung benar-benar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Bahkan, beberapa stasiun TV dunia pernah mengambil gambar dan mengulasnya.

Bambang menjelaskan, kawasan Hutan Kota Teluk Akar Begantung di Kabupaten Ketapang awalnya merupakan kawasan areal penggunaan lain (APL) di tepi Sungai Pawan di sebelah timur laut Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Karena areal itu memiliki keanekaragaman jenis dan potensi pepohonan yang cukup tinggi, dalam upaya menjaga keseimbangan iklim mikro, estetika, serta resapan air, dilakukanlah salah satu upaya konservasi dengan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan kota melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150 Tahun 2004 tanggal 7 Mei Tahun 2004 tentang Penunjukan Hutan Kota di Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, seluas 106 hektare.

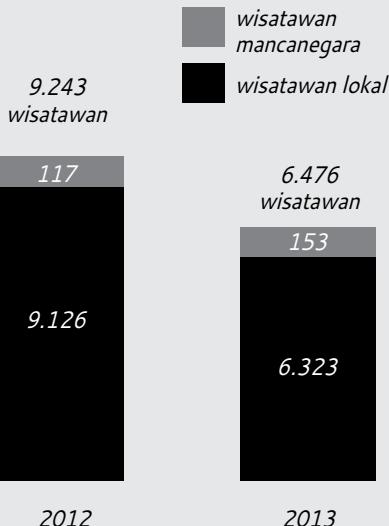
Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Penunjukan tersebut juga mengacu pada Rencana Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat yang telah memperoleh kesepakatan dari berbagai instansi terkait yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat.

Kawasan Hutan Kota Teluk Akar Begantung secara administratif terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Pengelolaan hutan kota tersebut diamanatkan kepada Unit Pelaksana Hutan Kota Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang.

Vegetasi Penyusun Kawasan Hutan Kota

PENGUNJUNG HUTAN KOTA



Kawasan Hutan Kota Teluk Akar Begantung merupakan perpaduan antara tipe hutan rawa gambut (*peat swamp forest*) dan hutan dataran rendah (*dry lowland rainforest*). Hutan tersebut juga sangat dipengaruhi pasang surut air laut dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.

Adapun vegetasi penyusun ekosistemnya meliputi: bintangor (*Calopyl-*

lum soulatri), medang (*Litsea pariqenia*), meranti (*Shorea*, *Sp*), nyatoh (*Ganua motleyana*), beringin rawa (*Ficus*, *spp*), rengas (*Gluta renghas*), bungur (*Lagerstroemia*, *spp*), muta-muta (*Bruguera sexangulata*), pohon kemenyan (*Styrax*, *spp*), putat (*Baringtonia racemosa*), ubah (*Eugenia*, *spp*), pisang-pisang (*Musa*, *spp*), jelutung (*Dyera costulata*), dungun (*Heritiera littoralis*), waru (*Hibiscus tileaceus*), kopi hutan (*Canthium dicoccum*), mata pelanduk (*Elateriospermum tapos*), rukam (*Flacourtie rukam*), pandan-pandan (*Pandanus pandan*), kantong semar (*Nephentes*, *spp*), serta beberapa jenis anggrek hutan.

Satwa di Kawasan Hutan Kota

Beberapa jenis primata yang ditemukan di Kawasan Hutan Kota Teluk Akar Begantung, antara lain, bekantan (*Nasalis larvatus*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), kelempiau (*Hylobates muelleri*), beruk (*Macaca memestrina*), kukang (*Nycticebus coucang*), dan lutung. Ditemukan pula beberapa satwa lain seperti rusa (*Lervus unicolor*), pelanduk (*Tragulus napu*), babi hutan (*Sus barbatus*), berang-berang (*Lutrogale perspicillata*), kucing hutan (*Prionailurus planiceps*), tupai besar (*Ratuffa affinis*), musang (*Paradoxorus hermaphrodites*), biawak (*Paranus salvator*), buaya air tawar (*Tomistoma sclegelii*), dan labi-labi (*Carettochelys insculpta*).

Jenis-jenis burung yang dijumpai, antara lain, murai batu (*Copsychus malabaricus*), murai air (*Heterophasia picaoides*), kacer (*Magpie robin*), sri gunting (*Dicrurus hottentottus*), perleng (*Aplonis panyensis*), serindit (*loriculus pusillus*), isap madu (*Leptocoma*, *spp*), prenjak (*Prinia*, *spp*), raja udang (*Alcedo*, *spp*), burung enggang (*Buceros rhinoceros*), dan beberapa jenis kupu-kupu hutan.

Beberapa jenis satwa yang ada merupakan hasil kegiatan pelepasliaran kembali oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Ketapang dan pelepasliaran kembali satwa oleh masyarakat di sekitar Kabupaten Ketapang.

Fasilitas Penunjang Hutan Kota

Sampai 2013, sarana dan prasarana di Kawasan Hutan Kota Teluk Akar Begantung meliputi tempat pejalan kaki/gertak hutan kota yang telah terbangun sepanjang sekitar 2.650 meter, musala, dua rumah jaga, tiga fasum/WC umum, menara pengawas, dua *shelter* pemancingan, *shelter* peristirahatan, pusat data dan informasi (tahap penyelesaian), serta sarana transportasi dan pengawasan, yaitu satu unit *long boat* 15 PK dan dua unit kendaraan roda.

Aksesibilitas

Dari pusat Kota Ketapang, hutan kota dapat ditempuh dengan dua cara. Yaitu, menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan waktu 1015 menit. Atau, menggunakan motor kelotok selama 1,5 jam dan *long boat* 15 PK sekitar setengah jam dari Jembatan Pawan I.

Untuk mengetahui *carrying capacity* dan *biodiversity* vegetasi penunjang sumber pakan bagi satwa di dalam kawasan hutan kota, ke depan direncanakan program rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan itu meliputi inventarisasi jenis, pengayaan jenis, dan penamaan jenis-jenis tumbuhan di kawasan hutan kota.

Demi kemudahan para wisatawan, diharapkan akses menuju kawasan hutan kota bisa menjadi perhatian pemkab. Sebab, jalan ke tempat tersebut sepanjang 750 meter sering terputus dan tidak dapat dilewati kendaraan kala musim hujan.

Selain Kawasan Hutan Kota Teluk Akar Begantung di Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Unit Pelaksana Hutan Kota Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang diberi mandat mengelola Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KNKT) habitat orang utan berbagai jenis dan satwa lain seluas 1.024 hektare di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, serta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KNKT) Kelompok Hutan Bakau Sungai Tembilok-Sungai Air Mata seluas 504,40 hektare di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang.

Kru PPIP



BUDI DARMAWAN

Direktur Eksekutif

Sarjana Hukum dari Universitas Tanjungpura ini dipercaya untuk merintis sekaligus menjadi nahkoda PPIP sejak Januari 2013. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya yang panjang dalam mengelola event di lingkungan Pontianak Post. Sebelumnya, Budi adalah manajer *Event Organizer* (2008–2013) koran terbesar di Kalimantan Barat tersebut. Pria kelahiran Agustus 1978 ini memulai karir sebagai wartawan Pontianak Post yang bertugas meliput berbagai peristiwa di Kalimantan Barat.
(email: budi@pontianakpost.com)



ANGGA PURDIKA

Peneliti

Pria bergelar Sarjana Ekonomi ini turut mengawali berdirinya PPIP pada Januari 2013. Untuk lebih mengenal Otonomi Awards dan segala aspeknya, Pontianak Post menugaskan Angga untuk terlibat langsung dalam riset Otonomi Awards di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sudah akrab dengan lingkungan kerja di Pontianak Post sejak 2009, jauh sebelum dia lulus dari almamaternya, Universitas Tanjungpura. Selama tiga tahun, ayah satu putra ini turut menjadi motor penggerak divisi Event Organizer Pontianak Post. Saat ini sangat menikmati turun ke berbagai pelosok daerah di Kalbar untuk melakukan riset Otonomi Awards.
(email: angga@pontianakpost.com)



MARETA

Peneliti

Di mata para koleganya, pria berdarah Padang ini dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan suka traveling. Karena itu, ketika ditugaskan di PPIP untuk melakukan penelitian, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura ini langsung tancap gas. Metodologi dan segala aspek penelitian Otonomi Award mampu ia kuasai dalam waktu singkat. Tidak butuh waktu lama juga bagi Mareta untuk membangun jaringan

dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memperkenalkan Otonomi Awards di Kalbar. Tak salah jika pria yang masih lajang ini menjadi salah satu peneliti andalan PPIP. (email: maretadasril@yahoo.co.id)



DEBI HERISTIAN

Peneliti

Dunia penelitian bukan barang baru bagi alumnus Fakultas Tarbiyah STAIN Pontianak ini. Pada 2009-2011, pria murah senyum ini dipercaya menjadi asisten sekaligus sekretaris salah satu guru besar FISIP Universitas Tanjungpura. Karena posisinya tersebut, ia berkesempatan melakukan riset-riset sosial dengan peneliti lokal maupun internasional seperti dari Jepang dan negara-negara Eropa. Selain meneliti, pria kelahiran November 1985 ini juga merupakan trainer dan motivator khusus bidang pendidikan. Karena itu, sejak 2006 pria yang juga menjadi penyuluhan budaya rayon Pontianak ini aktif memotivasi guru, pelajar, dan mahasiswa di Bumi Katulistiwa agar tetap bersemangat menggapai masa depan yang lebih baik.

(email: debiheristian@ymail.com)



ROOSANDRA DIAN WIJAYA ALQ

Peneliti

Dian merupakan satu-satunya peneliti perempuan di PPIP. Bekerja di lingkungan pria tidak membuat perempuan alumni Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak ini keder dan rendah diri. Sebaliknya, ini menjadikan perempuan kelahiran Pontianak 25 Januari lebih lebih tertantang. Bagi Dian, dunia riset sudah tidak asing lagi. Selain aktif di PPIP, perempuan ini juga aktif menjadi penggiat di Alqadrie Center.

(email: roosandra.dian.w.alqadrie@gmail.com)



ASIH MAULIDA

Sekretaris

Sebelum bergabung dengan PPIP Januari 2013, Asih menjadi salah satu motor penggerak di Bagian Event Pontianak Post. Akan tetapi, mengelola administrasi dan keuangan sudah menjadi hal yang tidak asing bagi perempuan ini. Ya, perempuan yang lahir pada 27 November 1986 ini menempuh pendidikan di STIE Nasional Pontianak ini. (email: asih@pontianakpost.com).

DORONG
KEMAJUAN
DAERAH



lewat

OTONOMI AWARDS

Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi (PPIP) merupakan lembaga nirlaba yang didirikan Pontianak Post (Jawa Pos Group) pada 1 Januari 2013.

Pendirian PPIP merupakan bentuk tanggung jawab sosial Jawa Pos Group untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah di Kalimantan Barat.

Setiap tahun, lembaga ini menganugerahkan Otonomi Awards kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang mempunyai terobosan di bidang ekonomi, pelayanan publik, dan politik lokal. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat kemajuan daerah agar bermakna bagi masyarakat, terutama di provinsi perbatasan seperti Kalimantan Barat.